

**STUDI KOMPARASI PERAN USP KUD SUBUR  
DAN BMT NUR RAHMAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM  
DI KECAMATAN SEMIN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:  
RETNO PARWATI  
12804241003

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

## LEMBAR PERSETUJUAN

STUDI KOMPARASI PERAN USP KUD SUBUR DAN BMT NUR RAHMAH  
DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN SEMIN

SKRIPSI

Oleh:

Retno Parwati

NIM. 12804241003

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal 25 Juli 2016

untuk dipertahankan di depan TIM Penguji Skripsi

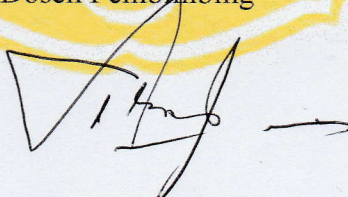
Program Studi Pendidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Sukidjo

NIP. 19500906 197412 1 001

## PENGESAHAN

STUDI KOMPARASI PERAN USP KUD SUBUR DAN BMT NUR RAHMAH  
DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN SEMIN

### SKRIPSI


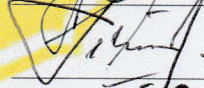
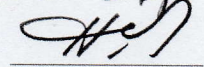
Oleh:

Retno Parwati

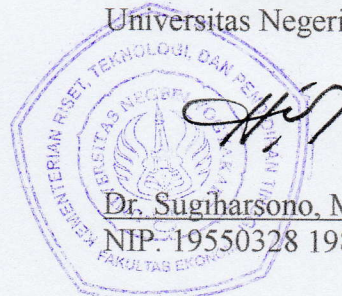
NIM. 12804241003

Telah dipertahankan di depan TIM Penguji Skripsi Program Studi  
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
pada tanggal 01 Agustus 2016 dan dinyatakan lulus.

#### TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dra. Barkah Lestari, M.Pd.	Ketua Penguji		16/8 2016
Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd.	Sekretaris Penguji		18/8 2016
Dr. Drs. Sugiharsono, M.Si.	Penguji Utama		16/8 2016

Yogyakarta, 19 Agustus 2016  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Sugiharsono, M.Si  
NIP. 19550328 198303 1 0021

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

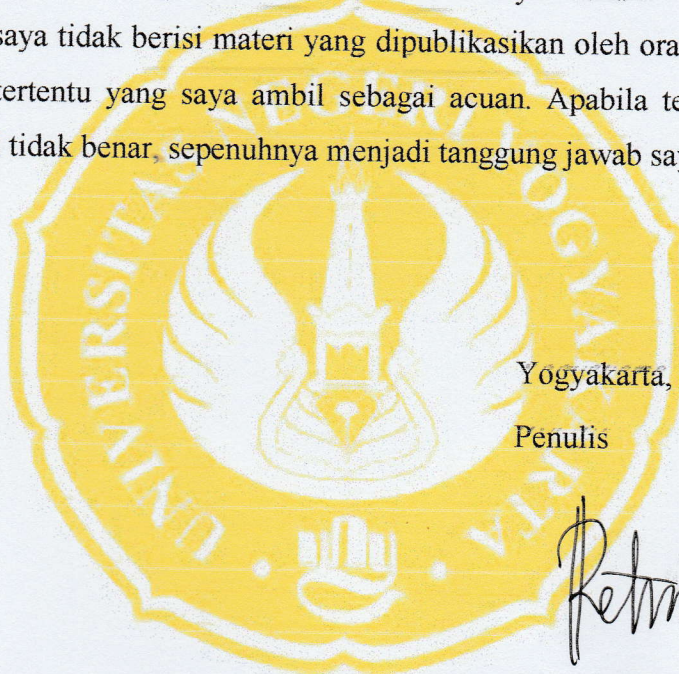
Nama : Retno Parwati

NIM : 12804241003

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Skripsi : Studi Komparasi Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah  
dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Semin

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.



Yogyakarta, 25 Juli 2016

Penulis

Retno Parwati

NIM. 12804241003

## **MOTTO**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al Insyirah: 6-8)

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau harta itu berkurang jika dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh syukur, kupersembahkan karya kecil ini sebagai salah satu

wujud terimakasihku kepada:

Kedua orangtua tercinta, Bapak Parjono dan Ibu Sukinem.

Terimakasih atas dukungan moral maupun material yang tak ternilai  
harganya.

**STUDI KOMPARASI PERAN USP KUD SUBUR DAN BMT NUR  
RAHMAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM  
DI KECAMATAN SEMIN**

**Oleh  
Retno Parwati  
12804241003**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah di Kecamatan Semin, (2) perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah di Kecamatan Semin, dan (3) perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen di Kecamatan Semin.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah peran pengawasan, peran pembinaan, dan pengembangan UMKM. Populasi penelitian ini adalah anggota KUD Subur yang mengambil pembiayaan dari USP KUD Subur untuk kegiatan pengembangan UMKM sebanyak 974 anggota dan anggota BMT Nur Rahmah yang mengambil pembiayaan dari BMT Nur Rahmah untuk kegiatan pengembangan UMKM sebanyak 550 anggota. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 UMKM yang diambil dengan menggunakan teknik *Cluster Quota Random Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah *Independent t-Test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan peran pengawasan pembiayaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP UD Subur dan BMT Nur Rahmah, (2) tidak terdapat perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah, dan (3) tidak terdapat perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen.

**Kata kunci:** Peran Pengawasan, Peran Pembinaan, Pengembangan UMKM

*A COMAPARATIVE STUDY OF THE ROLES OF USP KUD SUBUR AND BMT  
NUR RAHMAH IN DEVELOPING MSMEs IN SEMIN DISTRICT*

By  
Retno Parwati  
12804241003

*ABSTRACT*

*This study aims to investigate: (1) the difference of the role of control on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) receiving funding between USP KUD Subur and BMT Nur Rahmah in Semin District, (2) the difference of the role of guidance on MSMEs receiving funding between USP KUD Subur and BMT Nur Rahmah in Semin District, and (3) the difference of the roles USP KUD Subur and BMT Nur Rahmah in the development of MSMEs in terms of the turnover, profit, and number of consumers in Semin District.*

*This was a descriptive study using the quantitative approach. The research variables were the role of control, role of guidance, and development of MSMEs. The research population comprised members of KUD Subur getting funding from USP KUD Subur for the activity to develop MSMEs with a total of 974 members and members of BMT Nur Rahmah getting funding from BMT Nur Rahmah for the activity to develop MSMEs with a total of 550 members. The research sample consisted of 120 MSMEs selected by means of the Cluster Quota Random Sampling technique. The data in the study were collected by a questionnaire and documentation. The data analysis technique was the independent t-test.*

*The results of the study showed that (1) there is a difference in the role of control on the funding between MSMEs receiving funding from USP UD Subur and those receiving funding from BMT Nur Rahmah, (2) there is no difference in the role of guidance between MSMEs receiving funding from USP UD Subur and those receiving funding from BMT Nur Rahmah, and (3) there is no difference in the role impact between USP KUD Subur and BMT Nur Rahmah in the development MSMEs in terms of turnover, profit, and number or consumers.*

*Keywords: Role of Control, Role of Guidance, Development of MSMEs*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Semin” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan.

Pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta serta fasilitas yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus sebagai narasumber dan penguji utama yang telah memberikan bimbingan, masukan serta kelancaran selama menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Tejo Nurseto, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan kelancaran pelaksanaan penelitian dan izin untuk menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Daru Wahyuni, M.Si. selaku penasihat akademik yang selalu memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama menjalani studi.

5. Bapak Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd. selaku dosen pembimbing, yang selalu meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, kritik, dan motivasi selama menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Dra. Barkah Lestari, M.Pd. selaku ketua penguji, terima kasih atas bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi, terima kasih atas segala bimbingan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat.
8. Bapak Dating Sudrajat selaku Admin Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah membantu selama penulis menjalani studi.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalani studi.
10. Bapak Sugiyono, Bapak Wasimin, dan segenap karyawan USP KUD Subur Kecamatan Semin Gunungkidul yang telah memberikan izin penelitian, bantuan dan kelancaran selama menyelesaikan skripsi.
11. Ibu Suprapti Trigiyarsi, SE. dan segenap karyawan BMT Nur Rahmah Kecamatan Semin Gunungkidul yang telah memberikan izin penelitian, bantuan dan kelancaran selama menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh responden penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas waktu dan kerja samanya.
13. Mas Basuki, Mas Sugiman, dan Mas Sugiyanto, terima kasih telah menjadi kakak- kakak yang selalu memberi dukungan.
14. Hanna Rianita Putri, Nur Latiffah Rukmana, dan Nur Aidha Rachman, sahabat- sahabat yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan.

15. Keluarga besar Pendidikan Ekonomi 2012 khususnya kelas A1, terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan selama ini.
16. Ucup, Ali, Alma, Hima, Ikhsan, Yoko, Diah, Aan, Kabul, Mba Hani, Mba Iqlim, Nurul, Wiwit, Puput, dan Ruli terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi selama ini.
17. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 Juli 2016

Penulis,



Retno Parwati

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
 BAB II. KAJIAN TEORI .....	 11
A. Deskripsi Teori.....	11
1. Pembiayaan .....	11
a. Pengertian Pembiayaan .....	11
b. Tujuan Pembiayaan.....	12
c. Syarat Pengajuan Pembiayaan .....	13
d. Pembiayaan/ Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam.....	16
e. Pembiayaan pada <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> .....	16
2. Pengawasan .....	17
a. Pengertian Pengawasan .....	17
b. Tujuan Pengawasan.....	18
c. Macam- macam Pengawasan .....	18

d. Pengawasan Pembiayaan oleh Koperasi dan <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> .....	20
3. Pembinaan .....	22
a. Pengertian Pembinaan .....	22
b. Tujuan Pembinaan .....	22
c. Pembinaan UMKM oleh Koperasi dan <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> .....	23
4. Pengembangan .....	25
a. Konsep Pengembangan .....	25
b. Indikator Pengembangan .....	26
c. Konsep Pengembangan UMKM oleh Koperasi dan <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> .....	27
5. Koperasi .....	28
a. Pengertian Koperasi .....	28
b. Asas dan Prinsip Koperasi .....	29
c. Jenis Koperasi .....	30
6. Koperasi Simpan Pinjam .....	33
a. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam .....	33
b. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam .....	37
c. Jenis Koperasi Simpan Pinjam .....	40
7. Koperasi Unit Desa .....	41
a. Sejarah Koperasi Unit Desa .....	41
b. Bidang- bidang Usaha .....	41
c. Unit Simpan Pinjam .....	42
8. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> .....	43
a. Pengertian <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> .....	43
b. Sejarah <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> .....	44
c. Prinsip <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> .....	45
d. Produk <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> .....	46
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	53
a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	53
b. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	54
c. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	56
d. Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	57

10. Hubungan Unit Simpan Pinjam dan <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	57
11. Persepsi .....	59
a. Pengertian Persepsi .....	59
b. Syarat Terjadinya Persepsi .....	59
c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	59
d. Persepsi terhadap Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah .....	60
B. Penelitian yang Relevan .....	61
C. Kerangka Berpikir .....	63
D. Perumusan Hipotesis .....	64
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Jenis Penelitian .....	66
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	66
C. Populasi dan Sampel .....	66
1. Populasi .....	66
2. Sampel .....	67
D. Variabel Penelitian .....	68
E. Definisi Operasional .....	68
1. Peran Pengawasan .....	68
2. Peran Pembinaan .....	69
3. Pengembangan UMKM .....	69
F. Teknik Pengumpulan Data .....	70
G. Instrumen Penelitian .....	71
H. Uji Coba Penelitian .....	73
I. Teknik Analisis Data .....	74
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	76
1. Letak dan Luas Daerah .....	76
2. Keadaan Demografi Masyarakat .....	77
B. Karakteristik Responden .....	81
1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	81
2. Karakteristik Responden berdasarkan Umur .....	82
3. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	84

4. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha.....	85
5. Karakteristik Responden berdasarkan Kegiatan Usaha .....	86
6. Karakteristik Responden berdasarkan Alasan Memilih Berwirausaha.....	87
C. Analisis Data .....	88
1. Uji Prasyarat Analisis.....	89
a. Uji Normalitas .....	89
b. Uji Homogenitas .....	90
2. Pengujian Hipotesis.....	90
D. Pembahasan.....	94
1. Perbedaan Peran Pengawasan terhadap UMKM Penerima Pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah...	94
2. Perbedaan Peran Pembinaan terhadap UMKM Penerima Pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah...	95
3. Perbedaan Dampak Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam Pengembangan UMKM Dilihat dari Segi Omset, Laba, dan Jumlah Konsumen.....	96
BAB V. PENUTUP .....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	102
C. Keterbatasan Penelitian .....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kontribusi UMKM dan Usaha Besar terhadap PDB.....	2
2. Jumlah Tenaga Kerja dan Pangsa UMKM dan Usaha Besar .....	2
3. Kisi- kisi instrumen Penelitian .....	71
4. Skor Alternatif Jawaban .....	73
5. Penduduk Kecamatan Semin menurut Kelompok Umur .....	78
6. Penduduk Kecamatan Semin menurut Tingkat Pendidikan .....	78
7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kecamatan Semin Tahun 2015.....	79
8. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	82
9. Karakteristik Responden berdasarkan Umur.....	83
10. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	84
11. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha .....	85
12. Karakteristik Responden berdasarkan Kegiatan Usaha.....	86
13. Karakteristik Responden berdasarkan Alasan Memilih Berwirausaha ....	87
14. Hasil Uji Normalitas.....	89
15. Hasil Uji Homogenitas .....	90
16. Analisis Uji-t Peran Pengawasan Pembiayaan .....	91
17. Analisis Uji-t Peran Pembinaan UMKM.....	92
18. Analisis Uji-t Dampak Peran Pengembangan UMKM .....	93
19. Perubahan Omset, Laba, dan Jumlah Konsumen pada Bidang Usaha yang Menerima Pembiayaan dari USP KUD Subur.....	97
20. Perubahan Omset, Laba, dan Jumlah Konsumen pada Bidang Usaha yang Menerima Pembiayaan dari BMT Nur Rahmah .....	97
21. Banyak Usaha yang Mengalami Perubahan Omset, Laba, dan Jumlah Konsumen Secara Keseluruhan dari Nasabah USP KUD Subur .....	99
22. Banyak Usaha yang Mengalami Perubahan Omset, Laba, dan Jumlah Konsumen Secara Keseluruhan dari Nasabah BMT Nur Rahmah.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir .....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lembar Penilaian Angket .....	110
2. Angket Penelitian untuk UMKM Nasabah USP KUD Subur .....	115
3. Angket Penelitian untuk UMKM Nasabah BMT Nur Rahmah .....	119
4. Data Keadaan Umum Responden USP KUD Subur .....	123
5. Data Keadaan Umum Responden BMT Nur Rahmah .....	125
6. Data Penelitian Responden USP KUD Subur .....	127
7. Data Penelitian Responden BMT Nur Rahmah .....	129
8. Hasil Uji Normalitas.....	131
9. Hasil Uji Homogenitas dan Uji <i>Independent t-test</i> Pengawasan Pembiayaan USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah .....	132
10. Hasil Uji Homogenitas dan Uji <i>Independent t-test</i> Pembinaan UMKM Penerima Pembiayaan dari USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah .....	133
11. Hasil Uji Homogenitas dan Uji <i>Independent t-test</i> Dampak Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah terhadap Pengembangan Usaha.....	134
12. Surat Keterangan Penelitian dari USP KUD Subur .....	135
13. Surat Keterangan Penelitian dari BMT Nur Rahmah.....	136

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Posisi pelaku sektor ekonomi telah berubah sejak terjadi krisis pada tahun 1998. Bahan baku impor yang meningkat drastis dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus menurun mengakibatkan banyak usaha besar gulung tikar. Tingkat bunga bank yang tinggi menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mampu melanjutkan usahanya lagi. Namun kondisi yang berlainan terjadi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketahanan UMKM ini terjadi karena kemampuan UMKM untuk memproduksi barang dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, permodalan UMKM tidak didapat dari bank, UMKM mempunyai modal terbatas dan pasar bersaing yang berdampak UMKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat, dan reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak yang memberhentikan pekerjanya sehingga penganggur beralih ke sektor informal (Tiktik Sartika Pratomo, 2004: 5).

Keberadaan UMKM telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kontribusi UMKM dan Usaha Besar terhadap PDB dalam persen

<b>Tahun</b>	<b>UMKM</b>	<b>Usaha Besar</b>
2009	58,05	41,95
2010	57,83	42,17
2011	57,60	42,40
2012	57,48	42,52
2013	57,56	42,44

Sumber: Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa meskipun secara keseluruhan mengalami penurunan, dalam kurun waktu lima tahun kontribusi UMKM terhadap PDB lebih besar daripada kontribusi Usaha Besar. Adanya keadaan seperti ini hendaknya menjadikan pemerintah lebih memperhatikan UMKM agar dapat tumbuh kembali dan merata di kalangan masyarakat ekonomi bawah.

Kontribusi lain dari UMKM yaitu berupa bertambahnya kesempatan kerja. Melalui UMKM masyarakat dapat membuka peluang kerja bagi diri sendiri bahkan orang lain sehingga lapangan kerja menjadi semakin banyak. Dengan semakin banyaknya lapangan kerja maka pengangguran dapat dikurangi. Berikut adalah tabel kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja dan Pangsa UMKM dan Usaha Besar

<b>Tahun</b>	<b>UMKM</b>		<b>Usaha Besar</b>	
	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Pangsa</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Pangsa</b>
2009	96.193.623	97,28%	2.692.374	2,72%
2010	98.238.913	97,27%	2.753.049	2,73%
2011	101.722.458	97,24%	2.891.224	2,76%
2012	107.657.509	97,16%	3.150.645	2,84%
2013	114.144.082	96,99%	3.537.162	3,01%

Sumber: Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah

Data pada tabel 2 menyajikan kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar daripada usaha besar. Meskipun pangsa tenaga kerja UMKM mengalami penurunan namun jumlahnya terus meningkat karena seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ketika pangsa tenaga kerja UMKM menurun hal sebaliknya terjadi pada pangsa tenaga kerja usaha besar. Hal ini bisa terjadi karena pangsa tenaga kerja UMKM dimiliki oleh usaha besar.

UMKM dalam memberikan kontribusi positif tentu tak lepas dari berbagai masalah yang harus dihadapi. Menurut Tulus Tambunan (2002: 80-81), pada umumnya masalah yang dihadapi oleh UMKM yaitu berupa keterbatasan modal kerja dan/ atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku kualitas baik dengan harga terjangkau, teknologi yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, dan keterbatasan informasi khususnya mengenai pasar dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi).

Pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Solusi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan keberadaan UMKM. UMKM dapat mengembangkan usaha dengan memanfaatkan fasilitas dari pemerintah dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain serta teknologi. Selain itu, UMKM juga dapat memanfaatkan berbagai pembiayaan sesuai peraturan perundang- undangan.

Kecamatan Semin merupakan wilayah di mana mata pencaharian penduduk mayoritas adalah sebagai petani. Namun Kecamatan Semin

merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai penghasil kerajinan berbasis UMKM. Banyaknya usaha produktif yang berkembang di Kecamatan Semin tentu tidak lepas dari bantuan lembaga keuangan yang ada. Di Kecamatan Semin sendiri berdiri lembaga keuangan berupa bank dan nonbank. Lembaga keuangan nonbank terdiri atas koperasi baik syariah dan konvensional. Selain koperasi juga ada pegadaian. Khusus untuk koperasi, masyarakat Kecamatan Semin belum sepenuhnya paham akan keberadaan koperasi. Banyak UMKM berkembang justru mencari pinjaman dari bank untuk bantuan modal. Padahal prosedur pengajuan pinjaman lebih mudah di koperasi. Selain kurang eksisnya koperasi ini, ada hal lain yang dapat mengganggu jalannya usaha koperasi. Hal tersebut adalah adanya beberapa anggota koperasi justru juga mengambil pinjaman dari bank. Tindakan seperti ini mengakibatkan terjadinya kredit macet karena anggota memprioritaskan angsuran bank daripada koperasi. Alasannya adalah ketentuan bank lebih tegas dan mengikat daripada koperasi.

Persaingan antara koperasi dengan bank inilah yang menjadi tantangan bagi koperasi di tengah-tengah fungsinya sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan UMKM. Peran koperasi baik syariah dan konvensional diharapkan benar-benar mampu untuk dapat mengembangkan UMKM khususnya dalam hal pembiayaan. Adanya ketentuan syariah dalam pelaksanaan tugas BMT Nur Rahmah tentu menjadikan pemberian pembiayaan, pengawasan dan pembinaan akan berbeda dengan USP KUD Subur.

Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Subur dan BMT Nur Rahmah merupakan lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah yang berada di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul. KUD Subur resmi berdiri pada 16 Januari 1976 dan telah memiliki badan hukum. Hingga saat ini KUD Subur memiliki anggota sebanyak 1.742 orang dengan unit usaha berupa penyaluran pupuk, pembayaran tagihan listrik, penanganan pasar desa, dan simpan pinjam. Namun untuk unit simpan pinjam baru terlaksana pada tahun 2000. Kemudian untuk BMT Nur Rahmah resmi berdiri pada 18 April 1997 dan juga telah memiliki badan hukum. Hingga saat ini BMT Nur Rahmah memiliki anggota sebanyak 1.378 orang. Kegiatan BMT Nur Rahmah dari awal berdiri berupa kegiatan simpan pinjam tentu saja dengan prinsip syariah. Antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama fokus pada pembiayaan produktif untuk UMKM di Kecamatan Semin.

USP KUD Subur hingga tahun 2014 telah memberikan pinjaman sebesar Rp 441.246.266 dengan suku bunga pinjaman sebesar 2% (*flat*). Pemberian pinjaman ini menggunakan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat tanah. Besar pinjaman di USP ini mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000. Pada tahun yang sama, BMT Nur Rahmah telah memberikan pembiayaan sebesar Rp 5.773.032.282 pada berbagai jenis akad pembiayaan. Besar pinjaman di BMT Nur Rahmah mulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 50.000.000 dengan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah. Pemberian pinjaman untuk pembiayaan ini sesuai dengan fungsi koperasi sebagai salah satu media pendekatan dalam pengembangan UMKM.

Namun dalam usahanya untuk berpartisipasi mengembangkan UMKM, USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah sama- sama mengalami kredit macet. Kredit macet ini terjadi karena terbatasnya SDM untuk dapat memberikan bimbingan pembinaan dan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan kepada UMKM. Selain keterbatasan SDM, masalah ini juga terjadi karena anggota yang meminjam tidak jujur dalam menggunakan dana pinjaman yang seharusnya untuk usaha produktif justru digunakan untuk kegiatan konsumtif. Sehingga ketika tiba waktu untuk mengembalikan pinjaman, para anggota belum mampu untuk mengembalikan.

Selain masalah tersebut, USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah belum mengetahui bagaimana peran keduanya dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Semin. Peran dalam pengembangan UMKM yaitu berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada UMKM baik dari USP maupun dari BMT. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan karena koperasi merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan UMKM (PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM). Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM maka koperasi berperan sebagai penyalur dana dari pemerintah untuk menyediakan dana. Selain itu, adanya koperasi diharapkan mampu membantu UMKM untuk mendapatkan dana demi perkembangannya. Dengan demikian, untuk mengetahui perbedaan peran antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam perkembangan UMKM perlu diadakan sebuah penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Studi Komparasi Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Semin”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut.

1. Banyak UMKM yang mengalami permasalahan khususnya bantuan permodalan.
2. KUD Subur dan BMT Nur Rahmah Kecamatan Semin memiliki banyak anggota namun tidak semuanya adalah anggota aktif.
3. KUD Subur dan BMT Nur Rahmah Kecamatan Semin belum dapat mengetahui secara pasti penggunaan kredit/ pembiayaan yang diajukan oleh anggota.
4. KUD Subur dan BMT Nur Rahmah Kecamatan Semin sama- sama mengalami kredit macet.
5. KUD Subur dan BMT Nur Rahmah belum mengetahui bagaimana peran keduanya dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Semin.

## **C. Batasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM. Peran dalam pengembangan UMKM adalah berupa pembiayaan untuk pengembangan usaha. Penelitian difokuskan pada perbedaan pengawasan dan pembinaan

antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada UMKM.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah?
2. Bagaimana perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah?
3. Bagaimana perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah di Kecamatan Semin.
2. Perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah di Kecamatan Semin.
3. Perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen di Kecamatan Semin.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kondisi sebenarnya mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah maupun konvensional tentang pengembangan UMKM.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah maupun konvensional mengenai berbagai pembiayaan untuk pengembangan usaha UMKM.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang lain.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait masalah yang diteliti khususnya lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional yaitu tentang peran pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang lembaga keuangan nonbank syariah dan konvensional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang peran pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada BMT dan USP.

c. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya Disperindagkop dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan usaha lembaga keuangan mikro syariah maupun konvensional dan pembiayaan bagi UMKM.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Pengertian pembiayaan yang lain adalah menurut PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah pembiayaan lebih biasa digunakan pada lembaga keuangan syariah, pada lembaga keuangan konvensional lebih dikenal dengan pinjaman.

Pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan (PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi). Pengertian lain mengenai pinjaman yaitu bungapenyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasiutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Istilah pembiayaan dan pinjaman tidak hanya digunakan pada lembaga keuangan bank, namun juga lembaga keuangan nonbank. Sehingga koperasi dengan basis konvensional menggunakan istilah pinjaman dan koperasi dengan basis syariah menggunakan istilah pembiayaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan/ pinjaman adalah penyediaan dana dalam bentuk uang atau yang dipersamakan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perbedaanya terletak pada lembaga keuangan mana yang memberikan dan sumber keuntungan yang didapat.

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Lembaga keuangan dalam menyediakan pembiayaan tentu memiliki tujuan. Tujuan tersebut di antaranya adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat (Muhammad Ridwan, 2014: 122). Menurut pemanfaatannya, Ahmad Sumiyanto

(2008: 151) mengungkapkan bahwa pembiayaan dapat digunakan untuk memenuhi barang- barang permodalan serta fasilitas- fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut (investasi). Selain untuk investasi, pembiayaan juga dapat digunakan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti luas dan menyangkut semua sektor ekonomi (modal kerja).

**c. Syarat Pengajuan Pembiayaan**

Dilihat dari kerangka praktis ketentuan pengajuan bantuan baik pembiayaan ataupun pinjaman, Unit Simpan Pinjam ataupun *Baitul Mal Wa Tamwil* tidaklah jauh berbeda. Hal yang membedakan adalah ketentuan bertransaksi dan memperhitungkan bagi hasil yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak sejak awal. Menurut Itep (2002: 38), beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam hal pengajuan pembiayaan/ pinjaman ke Unit Simpan Pinjam ataupun *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah sebagai berikut:

1) Jenis pembiayaan/ pinjaman

a) Pembiayaan/ pinjaman konsumtif

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan untuk sesaat maupun waktu yang relatif panjang (Ahmad Sumiyanto, 2008: 151).

b) Pembiayaan/ pinjaman produktif

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan (Ahmad Sumiyanto, 2008: 151).

2) Syarat Pembiayaan/ pinjaman

Menurut Kasmir (2010: 91), syarat dalam mengajukan bantuan pembiayaan/ pinjaman hendaknya calon peminjam memenuhi aspek sebagai berikut:

a) *Character*

Merupakan watak seseorang dalam hal ini adalah calon peminjam. Tujuannya untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan/ pinjaman benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” peminjam untuk membayar kewajibannya.

b) *Capacity*

Merupakan aspek untuk melihat kemampuan calon peminjam dalam membayar kewajiban yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan/ pinjaman yang disalurkan.

c) *Capital*

Karena lembaga keuangan ada yang tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap calon peminjam yang mengajukan permohonan pembiayaan/ pinjaman harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, *capital* merupakan aspek untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon peminjam terhadap usaha yang akan dibiayai.

d) *Collateral*

Merupakan jaminan dari calon peminjam baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Hendaknya jaminan melebihi jumlah pembiayaan/ pinjaman yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e) *Condition*

Kondisi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan bagaimana pembiayaan/ pinjaman akan diberikan disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pinjaman untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

**d. Pembiayaan/ pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam**

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam ataupun Unit Simpan Pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran dalam pemberian fasilitas pembiayaan/ pinjaman. Selain memberikan fasilitas berupa pembiayaan/ pinjaman, koperasi juga berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan (Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000: 8).

Berdasarkan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dari Departemen Koperasi, maka pemberian pembiayaan/ pinjaman kepada anggota/ calon anggota diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan/ pinjaman. Pengajuan permohonan ini harus disertai identitas peminjam, dapat berupa KTP/ SIM untuk kemudian diserahkan ke bagian administrasi. Selanjutnya bagian administrasi akan memeriksa kelengkapan prosedur tersebut dan memproses jumlah pinjaman anggota/calon anggota.

**e. Pembiayaan pada *Baitul Mal Wa Tamwil***

Keberadaan *Baitul Mal Wa Tamwil* sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki dua fungsi, yaitu perantara orang yang berzakat dan berinfaq dengan orang yang menerima zakat; dan fungsi sebagai

perantara investor dengan peminjam. Berdasarkan fungsi kedua, *Baitul Mal Wa Tamwil* dapat dipahami sebagai lembaga simpan pinjam (Ahmad Sumiyanto, 2008: 24). Karena dapat dipahami sebagai lembaga simpan pinjam maka seseorang dapat menerima pembiayaan untuk usaha dari *Baitul Mal Wa Tamwil*. Adapun standar umum dalam mengajukan pembiayaan kepada *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan proposal bantuan pembiayaan kepada *Baitul Mal Wa Tamwil* yang serupa dengan rencana bisnis melalui devisi pembiayaan.
- 2) Proposal yang telah diajukan selanjutnya dikaji terlebih dahulu oleh pihak *Baitul Mal Wa Tamwil*.
- 3) Pihak *Baitul Mal Wa Tamwil* akan melakukan survei lapangan guna mempertimbangkan pengajuan proposal.
- 4) Apabila disetujui, pemohon mencairkan dana pembiayaan atas surat perjanjian.
- 5) Penerima pembiayaan melunasi bantuan sesuai kemampuan, sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak *Baitul Mal Wa Tamwil* (Buchari Alma, 2000: 176).

## **2. Pengawasan**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan menurut Sondang P. Siagian (1984: 237) merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya. T. Hani Handoko (2009: 359) menambahkan bahwa pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Berdasarkan dua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan

merupakan proses pengamatan untuk menjamin semua pekerjaan atau tujuan organisasi tercapai.

#### **b. Tujuan Pengawasan**

Adanya pengawasan pada dasarnya bertujuan agar tujuan dalam organisasi yang bersangkutan tercapai. Menurut Victor. M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994: 22) tujuan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan- kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya masalah baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan standar.

Adanya pengawasan juga bertujuan agar penyimpangan yang terjadi dapat diketahui secara dini sehingga dapat segera dilakukan tindakan. Tindakan ini juga bertujuan agar tidak muncul atau meluas lagi permasalahan yang lain (Ade Arthesa, 2009: 180).

#### **c. Macam- macam Pengawasan**

Victor. M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994: 27) mengungkapkan bahwa pengawasan diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

## 1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

### a) Pengawasan Langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri, dan menerima laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

### b) Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan- laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat- pendapat masyarakat dan sebagainya tnpa pengawasan *on the spot*.

## 2) Pengawasan Preventif dan Represif

### a) Pengawasan Preventif

Merupakan pengawasan yang dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Tujuannya untuk pembinaan dan melakukan pencegahan. Hasibuan (2006: 106) menambahkan cara yang dapat dilakukan pada pengawasan preventif yaitu:

- (1) Penetapan plafon kredit
- (2) Pemantauan debitur
- (3) Pembinaan debitur

### b) Pengawasan Represif

Merupakan pengawasan yang dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, meminta

laporan pelaksanaan, dan sebagainya. Tujuannya untuk mencegah meluasnya permasalahan. Hasibuan (2006: 106) menambahkan tindakan penyelesaian pada pengawasan represif adalah sebagai berikut:

- (1) *Rescheduling*
- (2) *Reconditioning*
- (3) *Restructuring*
- (4) *Liquidation*

**d. Pengawasan Pembiayaan oleh Koperasi dan *Baitul Mal Wa Tamwil***

Pengawasan pembiayaan merupakan usaha penjagaan dan pengamanan pengelolaan kekayaan dalam bentuk pembiayaan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan yang benar (Ade Arthesa, 2009: 181). Koperasi dalam memberikan pembiayaan/pinjaman harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya (Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan UKM No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi). Hal yang dapat dilakukan oleh koperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian ini di antaranya adalah menetapkan plafon pinjaman, pengawasan terhadap peminjam, dan pembinaan terhadap peminjam.

Tidak hanya koperasi yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. BMT dalam memberikan pembiayaan juga harus menerapkan prinsip tersebut. Perbedaannya adalah bahwa BMT bertindak lebih proaktif, artinya tidak menunggu tetapi menjemput bola. Karena pelayanan BMT mengacu pada kebutuhan anggota sehingga BMT harus memberikan yang terbaik kepada anggota dan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dengan jemput bola ini dapat dilakukan dalam kegiatan- kegiatan masyarakat, seperti dalam pengajian rutin, di rumah, masjid, atau sekolah, kemudian dilanjutkan dengan perbincangan mengenai pembiayaan (Muhammad Ridwan, 2014: 127).

Pelaksanaan pengawasan baik koperasi atau BMT dapat dilaksanakan melalui dua cara lain, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat dilaksanakan dengan cara kunjungan dari pihak koperasi atau BMT ke lapangan/ usaha anggota, pelaksanaan langsung ini dapat dilaksanakan secara berkala dan juga dadakan. Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan laporan usaha dari penerima pembiayaan dan juga laporan- laporan dari masyarakat sekitar. Karena BMT bertindak lebih proaktif (menjemput bola) maka staff yang bekerja menjemput bola lebih banyak daripada KSP/ USP.

### **3. Pembinaan**

#### **a. Pengertian pembinaan**

Pembinaan merupakan satu kesatuan proses yang di dalamnya mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan. Proses pelaksanaan pembinaan hendaknya dilakukan secara partisipatif, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan (materi, metode dll) harus selalu bertumpu pada kebutuhan UMKM. Hubungan yang terjalin antara pihak yang membina dan yang dibina adalah sejajar di mana pihak yang membina berperan sebagai motivator (Laporan Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro dan Kajian Situasi Terkini Usaha Mikro di Provinsi Papua Barat, 2012: IX-2). Pengertian lain mengenai pembinaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.5/MBU/2007 adalah kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi tangguh dan mandiri.

Berdasarkan beberapa pengertian pembinaan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan proses menumbuhkan, memelihara, dan megembangkan yang dilakukan agar agar kemampuan usaha menjadi tangguh dan mandiri. Tentunya pelaksanaan pembinaan dilakukan secara partisipatif berdasar kebutuhan.

#### **b. Tujuan Pembinaan**

Tujuan pembinaan dapat dilihat dari pengertiannya, bahwa di dalam pembinaan mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan,

memelihara dan mengembangkan. Adanya ketiga unsur tersebut berarti dengan adanya pembinaan ada hal yang ingin ditumbuhkan, dipelihara, dan dikembangkan, tergantung apa yang dibina. Bisa jadi hal yang ingin ditumbuhkan berupa motivasi, atau kemauan. Adapun hal yang ingin dipelihara dapat berupa sebuah hubungan kemitraan, dan yang ingin dikembangkan berupa sebuah usaha yang dimiliki.

**c. Pembinaan UMKM oleh Koperasi dan *Baitul Mal Wa Tamwil***

Pembinaan UMKM oleh Koperasi dan *Baitul Mal Wa Tamwil* berarti bimbingan/ pendampingan yang dilakukan oleh Koperasi atau *Baitul Mal Wa Tamwil* terhadap nasabah/ anggota masing-masing yang memiliki UMKM dan menerima pembiayaan. Adanya pembinaan dari koperasi atau BMT ini karena tanggung jawab setelah memberi pembiayaan tak lepas begitu saja. Setelah pembiayaan diterima oleh anggota maka selanjutnya harus diawasi dan dibina agar si penerima pembiayaan tidak menyalahgunakan pembiayaan yang didapatkan.

Adapun pola pembinaan UMKM oleh koperasi sedikit berbeda dengan *Baitul Mal Wa Tamwil*. Perbedaan tersebut timbul karena BMT memiliki ciri khas di mana BMT lebih proaktif untuk membina dan mendampingi dengan cara jemput bola. Pelaksananya dapat dilakukan pada pengajian rutin, di rumah, atau di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan perbincangan mengenai bisnis. Pada kegiatan-kegiatan tersebut juga dilakukan angsuran dan pembiayaan. Agar pembinaan lebih mudah dilakukan maka dibentuklah kelompok-kelompok usaha.

Kelompok usaha dapat berdasarkan kedekatan domisili atau jenis usaha. Adapun jumlah anggota setiap kelompoknya yang ideal adalah 10- 25 orang dan setiap kelompok didampingi satu staf BMT (Muhammad Ridwan, 2014: 127).

Adanya pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan oleh koperasi maupun BMT ini pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pembinaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM.
- 2) Terwujudnya UMKM menjadi usaha yang efisien, sehat dan memiliki pertumbuhan yang tinggi, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional.
- 3) UMKM yang dapat berperan maksimal dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan.
- 4) Terciptanya bentuk-bentuk kerjasama yang dapat memperkuat kedudukan UMKM dalam kompetisi di tingkat nasional dan internasional (Laporan Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro dan Kajian Situasi Terkini Usaha Mikro di Provinsi Papua Barat, 2012: IX- 8).

Pendapat lain yang mengungkapkan tujuan pembinaan UMKM adalah dari Tiktik Sartika Pratomo dan Adb. Rachman Soejoedono (2004: 27). Berikut adalah tujuan pembinaan UMKM tersebut:

- 1) Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- 2) Meningkatkan akses terhadap sumber- sumber modal dan memperbesar struktur modal.
- 3) Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.
- 4) Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

#### **4. Pengembangan**

##### **a. Konsep Pengembangan**

Konsep pengembangan UMKM bertumpu pada PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM yang menyatakan bahwa UMKM adalah salah satu pilar yang memiliki kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang seluas- luasnya. Hal- hal tersebut adalah wujud keberpihakan tegas kepada usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran dari usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa:

“Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.

Mengenai pengembangan UMKM, dalam PP No. 17 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah pusat melakukan pemberdayaan UMKM sesuai dengan daerah kerjanya. Pemberdayaan yang dimaksud dapat dilakukan dengan kegiatan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan koordinasi serta pengendalian. Pengembangan usaha sesuai PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM dapat berupa fasilitasi pengembangan usaha dan pelaksanaan pengembangan usaha. Fasilitasi pengembangan usaha dapat dilakukan dengan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain

dan teknologi. Sedangkan pelaksanaan pengembangan usaha dapat dilakukan dengan pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi; penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Berbagai kegiatan pengembangan UMKM yang telah disebutkan di atas dapat dilaksanakan melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok. Dalam pelaksanaannya dapat memilih salah satu pendekatan yang ada atau menggabungkan beberapa pendekatan tersebut (PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM).

#### **b. Indikator Pengembangan**

Adanya upaya pengembangan yang didukung berbagai pihak maka UMKM harus dapat berkembang. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil upaya pengembangan UMKM menurut Jeaning dan Beaver dalam Muhammad Soleh (2008: 24) yaitu Kinerja perusahaan (UMKM) secara umum dan keunggulan kompetitif merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil. Pengukuran terhadap pengembalian investasi, pertumbuhan, volume, laba dan tenaga kerja pada perusahaan umum dilakukan untuk mengetahui kinerja perusahaan.

Para peneliti, yaitu Kim dan Choi (1994); Lee dan Miller (1996); Lou (1999); Miles (2000); Hadjimanolis (2000) dalam Muhammad Soleh (2008: 26) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran kinerja perusahaan kecil yang paling penting. Maka disimpulkan bahwa indikator untuk perkembangan usaha dapat dilihat dari berbagai sisi.

**c. Konsep Pengembangan UMKM oleh Koperasi dan *Baitul Mal Wa Tamwil***

Sesuai PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM bahwa kegiatan pengembangan UMKM dapat dilaksanakan dengan pendekatan salah satunya melalui koperasi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka koperasi (konvensional maupun syariah) dapat membantu pengembangan UMKM salah satunya dengan memberikan pembiayaan untuk bantuan modal usaha.

Menurut Tiktik Sartika Partomo dan Adb. Rachman Soejoedono (2004:2), arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut:

- 1) Memadukan dan memperkuat tiga aspek, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan (pemberian pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan).
- 2) Mengoptimalkan penunjukkan bank dan lembaga keuangan mikro untuk UMKM.
- 3) Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
- 4) Meningkatkan lembaga penjaminan kredit yang ada.
- 5) Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai pembiayaan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangan di atas maka koperasi baik konvensional maupun syariah sangatlah memiliki peran dalam upaya pengembangan UMKM. Peran tersebut dimulai dari pemberian pembiayaan, dilanjutkan adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan, dan pembinaan agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

## **5. Koperasi**

### **a. Pengertian Koperasi**

Menurut Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hendar (2010: 2) menambahkan bahwa koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Revrisond Baswir (1997: 2) menyatakan bahwa koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui sebuah perusahaan yang demokratis.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha/ organisasi dari orang- seorang atau badan hukum yang secara sukarela berhimpun untuk memenuhi kesejahteraan mereka dengan asas kekeluargaan. Orang- seorang maupun badan hukum yang menjadi anggota dalam koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna dari produk yang ada dalam koperasi tersebut.

#### **b. Asas dan Prinsip Koperasi**

Sesuai yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1, bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Menurut Burhanuddin (2013: 10), dengan adanya asas kekeluargaan ini maka segala pemikiran mengenai koperasi harus bertumpu pada pendekatan kekeluargaan, tidak hanya memandang pada kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonomi.

Selain asas kekeluargaan yang dijadikan sebagai tumpuan pemikiran, koperasi juga memiliki prinsip- prinsip yang dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan. Prinsip- prinsip yang digunakan koperasi tersebut antara lain menurut *International Cooperative Alliance (ICA)*. *International Cooperative Alliance (ICA)* menyebutkan bahwa prinsip koperasi adalah sebagai berikut (Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000: 54):

- 1) Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat- buat.
- 2) Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara.
- 3) Bunga atas modal bersifat terbatas, itupun jika ada.

- 4) Sisa hasil usaha dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
  - a) Sebagian untuk cadangan.
  - b) Sebagian untuk masyarakat.
  - c) Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing- masing anggota.
- 5) Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus.
- 6) Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Kemudian untuk di Indonesia sendiri, prinsip koperasi tercantum dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5, yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian.
- 7) Kerja sama antarkoperasi.

### **c. Jenis Koperasi**

Jumlah koperasi yang tersebar dalam suatu daerah atau bahkan negara sangat banyak. Tidak hanya jumlahnya namun jenis kegiatan koperasi juga beragam. Menurut Djoko Muljono (2012: 4), jumlah dan jenis yang banyak tersebut dapat dikelompokkan menjadi seperti berikut ini:

- 1) Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi
  - a) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari- hari para anggotanya. Kemudian Revrisond Baswir (1997: 76) menambahkan bahwa jenis barang

konsumsi dalam koperasi konsumen bergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang harus dipenuhi.

b) Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi. Revrison Baswir (1997: 76) menambahkan bahwa biasanya koperasi produksi juga kental akan kegiatan memasarkan barang-barang yang diproduksinya. Koperasi produsen dalam kegiatannya memiliki tujuan utama, yaitu untuk menyatukan kemampuan dan modal dari para anggotanya untuk menghasilkan suatu barang melalui wadah yang mereka kelola dan miliki sendiri.

c) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga sering disebut dengan koperasi kredit. Revrison Baswir (1997: 78) menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bertujuan untuk membebaskan masyarakat khususnya para anggota agar terbebas dari jerat renternir.

## 2) Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggota

### a) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama bidang pertanian.

### b) Koperasi Pasar

Koperasi Pasar adalah koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar.

### c) Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah adalah koperasi yang anggotanya terdiri atas siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru.

### d) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) adalah koperasi yang anggotanya para pegawai negeri. Di Indonesia dikenal dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

## 3) Jenis koperasi berdasarkan kondisi anggotanya

### a) Koperasi Primer

Koperasi Primer merupakan koperasi yang didirikan dan beranggotakan oleh orang- seorang dengan jumlah anggota minimal 20 (dua puluh) orang. Revrisond Baswir (1997: 82) menambahkan bahwa Koperasi Primer biasanya didirikan pada suatu wilayah terkecil tertentu dan daerah kerjanya terbatas dalam lingkungan wilayah tempat tinggal anggotanya tersebut.

#### b) Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder merupakan koperasi yang didirikan dan beranggotakan Koperasi Primer. Menurut Revrisond Baswir (1997: 82), Koperasi Sekunder bertujuan untuk memperkuat Koperasi Primer yang menjadi anggotanya. Koperasi Sekunder berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Contoh Koperasi Sekunder yaitu Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud), Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad), dan Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar).

### 6. Koperasi Simpan Pinjam

#### a. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Hudiyanto (2002: 65), kemunculan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak terlepas dari sejarah kelam keadaan buruh tani di Jerman pada abad 19. Mengingat pada abad 19 perekonomian Jerman bercorak agraris, namun terjadi kesenjangan pada perekonomian penduduknya. Di mana sebagian kecil penduduk menjadi tuan tanah dan menjadikan penduduk lain menjadi buruh tanpa kebebasan. Keadaan ini berlangsung hingga pada akhirnya muncul harapan perbaikan nasib buruh tani melalui munculnya Undang- Undang Agraria (*Agrareform*) yang baru oleh pemerintah Jerman pada 1907. Kemunculan Undang- Undang Agraria (*Agrareform*) pada tahun 1907 ternyata juga masih diwarnai oleh adanya praktik pinjaman yang berat melalui renternir. Keadaan seperti memunculkan aksi dari Raiffeisen

dan Schulze dengan latar belakang tekanan yang berbeda. Raiffeisen menekankan pada kehidupan petani gurem dan buruh tani sedangkan Schulze menekankan pada nasib buruh tani dan pengusaha industri kecil.

Frederich William Raiffeisen adalah seorang walikota di Flemmerfeld, Weyerbush dan terakhir di Helderhof. Sebagai seorang walikota, Raiffeisen tahu persis bagaimana kehidupan warganya sehingga Raiffeisen merasa sangat prihatin. Undang- Undang Agraria yang ada tidak banyak membantu kehidupan masyarakat lemah. Atas dasar rasa kemanusiaan kemudian Raiffeisen mengadakan kumpulan simpan pinjam di kalangan petani. Dibantu oleh sejumlah dermawan tempat Raiffeisen bertugas, perkumpulan simpan pinjam akhirnya dapat berkembang menjadi Bank Rakyat (Hudiyanto, 2002: 66).

Gerakan koperasi kredit model Raiffeisen yang menekankan pada buruh tani dan petani gurem diikuti dengan koperasi yang menjamin buruh industri dan pengusaha ekonomi lemah. Gerakan ini dipelopori oleh Herman Schulze dari kota Delitzsch. Kehidupan kaum buruh, tukang, dan pengusaha kerajinan rakyat amat memprihatinkan. Industri kecil pada saat itu belum mampu bersaing dengan industri yang bermodal besar adalah salah satu sebab keprihatinan masyarakat saat itu. Selain itu untuk memperoleh modal dengan syarat mudah dan murah juga masih sulit (Supardjiman dalam Hudiyanto, 2002:68).

Pokok- pokok koperasi yang didirikan oleh Raiffeisen dan Schulze pada akhirnya terus digunakan dan berkembang. Koperasi kredit dalam hal ini dapat dibentuk pada setiap bidang usaha atau koperasi (Hudiyanto, 2002: 69).

Jika uraian di atas merupakan sejarah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di belahan Eropa, maka di Indonesia juga memiliki sejarah Koperasi simpan Pinjam (KSP) tersendiri. Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 9), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia diawali oleh Raden Ngabei Ariawiriaatmaja, seorang Patih Purwokerto yang telah mendirikan Bank Simpan- Pinjam bersama kawan- kawannya untuk menolong rekan- rekan sejawatnya yaitu para pegawai negeri pribumi agar terlepas dari jerat renternir pada 1895. Bank Simpan- Pinjam ini diberi nama *De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* yang artinya kurang lebih adalah Bank Simpan Pinjam Para “priyayi” Purwokerto (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 9).

Puncak perkembangan *De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouw Creditbank* terjadi pada tahun 1896, yaitu ketika jangkauan bank juga mencakup kredit pertanian oleh WPD de Wolf van Westerode. Perluasan jangkauan ini dilandasi oleh keinginan WPD de Wolf van Westerode untuk mewujudkan koperasi kredit sesuai prinsip Raiffeisen. Pendirian *De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouw Creditbank* juga diiringi dengan berdirinya Lumbung- Lumbung Desa

di pedesaan Purwokerto. Lumbung- Lumbung Desa di sini adalah lembaga simpan pinjam para petani namun bukan dalam bentuk uang (padi, hasil panen) karena pada waktu itu uang tunai masih langka di pedesaan.

Ketika Bank Simpan Pinjam oleh Patih Wiriaatmadja dan Lumbung- Lumbung Desa oleh de Wolf van Westerode berdiri, Indonesia belum mengenal perundang- undangan tentang koperasi. Baru pada tahun 1915, dengan diterbitkannya *Verordening op de Cooperative Vereeniging*, *Kononklik besluit 7 April 1915*, Indisch Staatsblad No. 431, badan hukum koperasi mulai dikenal. Perundang- undangan ini tidak berbeda dengan Undang- Undang Koperasi Negeri Belanda menurut Staatsblad tahun 1876 No. 277.

Menindaklanjuti kejelasan perundang- undangan koperasi, maka pada 1920 diadakan *Cooperative Commisie* yang diketuai oleh Dr. JH. Boeko. Komisi Koperasi ini bertugas untuk menyelidiki kemanfaatan koperasi di Indonesia, kemudian hasilnya diserahkan kepada Pemerintah pada September 1921. Hasil penyelidikan tersebut adalah bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Adanya berbagai tuntutan dan perkembangan zaman, maka pada tahun 1927 dikeluarkanlah sebuah peraturan tentang koperasi khusus bagi golongan bumi putra yaitu *Regeling Inlandsche Cooperative Vereenigingen*. Sebagai langkah nyata upaya penggiatan pergerakan koperasi, maka berdirilah Jawatan Koperasi yang dipimpin

oleh Prof. J.H. Boeko pada 1930. Adanya Jawatan Koperasi ini kemudian diikuti berbagai kongres dan musyawarah nasional. Sehingga terbentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) pada 12 Juli 1947. Selain itu juga terselenggaranya Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) sebanyak dua kali. Adanya Munaskop ini, perkembangan koperasi terus menyesuaikan tuntutan zaman.

Perundang- undangan terus dibentuk dan pada tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perkoperasian dan berlaku mulai 18 Desember 1967. Berlakunya Undang- Undang ini maka seluruh koperasi harus menyesuaikan diri dan organisasi koperasi juga dibenahi. Undang- undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain Undang- Undang yang baru ini, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Kredit kini terus berkembang. Hingga saat ini dunia perbankan belum mampu untuk memberikan pinjaman yang menjangkau masyarakat miskin. Hal ini mengakibatkan adanya praktik simpan- pinjam hingga di setiap daerah (Hudiyanto, 2002: 71).

#### **b. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam melaksanakan usahanya harus berpedoman pada prinsip yang dianutnya. Prinsip Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 23) yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Raiffeisen

Inti dari prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut:

- a) Swadaya
- b) Daerah kerja terbatas
- c) Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk cadangan
- d) Tanggung jawab anggota tidak terbatas
- e) Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
- f) Usaha hanya kepada anggota
- g) Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

2) Prinsip Schulze

Selain Raiffeisen, Schulze memberikan prinsip sebagai berikut:

- a) Swadaya
- b) Daerah kerja tidak terbatas
- c) Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
- d) Tanggung jawab anggota terbatas
- e) Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan
- f) Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

Penjelasan dari masing- masing prinsip di atas adalah sebagai berikut (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 24):

1) Swadaya

Yaitu usaha mandiri, bahwa para anggota tidak boleh bergantung pada bantuan dari manapun ketika menghadapi kesulitan.

2) Daerah kerja yang terbatas

Daerah kerja yang terbatas berarti bahwa daerah operasi koperasi terbatas pada daerah di mana masing- masing anggota saling

mengenal baik. Prinsip ini berbeda dengan yang dikembangkan oleh Schulze, di mana daerah kerja tidak terbatas.

3) Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk cadangan

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi seluruhnya digunakan untuk memperkuat modal koperasi. Prinsip ini akan berimbang pada pemantapan swadaya koperasi. Prinsip ini kemudian dikembangkan, di mana Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota selain untuk disisihkan sebagai cadangan.

4) Tanggung jawab anggota tidak terbatas

Prinsip ini bermakna jika koperasi menderita kerugian maka anggota turut bertanggungjawab. Prinsip ini berbeda dengan Schulze, bahwa tanggungjawab anggota terbatas.

5) Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

Prinsip ini bermakna bahwa pengurus tidak mendapatkan gaji dari koperasinya karena pengurus koperasi dipilih dari anggota. Namun prinsip ini tidak digunakan oleh Schulze.

6) Usaha hanya kepada anggota

Pada prinsip Raiffeisen, koperasi hanya melayani anggotanya namun pada prinsip Schulze koperasi juga melayani selain anggota koperasi.

### c. Jenis Koperasi Simpan Pinjam

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkembang di masyarakat salah satunya adalah koperasi. Salah satu dari berbagai jenis koperasi tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu berupa kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota (Djoko Muljono, 2012: 4). Prinsip yang digunakan dalam menjalankan tugas- tugasnya tunduk pada undang- undang yang menaunginya yaitu Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pada perkembangannya, sejak kemunculan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbasis syariah pada tahun 1992 yaitu berupa *Baitul Maal Wa Tamwil* maka terdapat dua jenis basis yang dapat dipilih untuk mengembangkan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Basis tersebut adalah konvensional dan syariah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional tidak boleh menjalankan usahanya menggunakan basis syariah begitu juga Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah tidak boleh menjalankan usahanya dengan basis konvensional (*Frequently Asked Questions* Otoritas Jasa Keuangan).

Adanya ketentuan untuk memilih salah satu basis dalam melaksanakan usaha simpan- pinjam maka berkembanglah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi badan- badan berbentuk koperasi dengan basis syariah. Sehingga saat ini dapat dijumpai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbentuk koperasi simpan pinjam berupa

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Unit Jasa Keuangan Syariah).

## **7. Koperasi Unit Desa**

### **a. Sejarah Koperasi Unit Desa**

Menurut Harsoyono Subyakto dan Bambang Tri Cahyono (1983: 86-87), sejarah Koperasi Unit Desa (KUD) dimulai pada tahun 1971, yaitu pada saat dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai persiapan dari Koperasi Unit Desa (KUD). Peranan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yaitu untuk membantu program Bimas yang pola kerjanya ditetapkan oleh Inpres No. 4 Tahun 1973 dan ditetapkan lagi oleh Inpres No. 2 Tahun 1978. Di dalam Inpres No. 2 Tahun 1978, tugas Badan Usaha Unit Desa (BUUD) adalah untuk menggerakkan dan melopori masyarakat desa agar ikut bersama melakukan kegiatan ekonomi dalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD).

### **b. Bidang- bidang Usaha**

Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai bidang usaha. Penentuan bidang- bidang usaha dalam Koperasi Unit Desa (KUD) didasarkan pada fungsi Koperasi Unit Desa (KUD). Adapun fungsi pelaksanaan Koperasi Unit Desa (KUD) adalah sebagai berikut:

- 1) Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal usaha bagi anggotanya dan juga warga desa.
- 2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi serta barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.
- 3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
- 4) Kegiatan perekonomian lainnya, seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.
- 5) Koperasi Unit Desa (KUD) harus mementingkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat (Arifinial Chaniago, 1984: 79).

**c. Unit Simpan Pinjam**

Salah satu bidang usaha yang ada dalam Koperasi Unit Desa (KUD) adalah Unit Simpan Pinjam (USP). Unit Simpan Pinjam (USP) ini merupakan wujud dari fungsi perkreditan. Unit Simpan Pinjam (USP) menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya.

Unit Simpan Pinjam (USP) dalam suatu koperasi memiliki kegiatan usaha berupa menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota, maupun koperasi lain. Selain itu Unit Simpan Pinjam (USP) juga dapat memberikan kredit/ pinjaman kepada anggota, calon anggota, maupun koperasi lain.

Unit Simpan Pinjam (USP) dalam melaksanakan kegiatannya harus tetap mengutamakan pelayanan terhadap anggota (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam).

## **8. *Baitul Maal Wa Tamwil***

### **a. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil***

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008: 24) *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun zakat, infaq, shodaqah (ZIS) untuk kemudian disalurkan ke usaha- usaha kecil dengan sistem bagi hasil. Selain itu juga disalurkan ke kaum *dhuafa* melalui sistem pinjaman kebajikan (*qard al hasan*) dan hibah. *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam fungsinya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *maal* dan fungsi *tamwil*. Dalam fungsi *maal*, maka *Baitul Maal Wa Tamwil* berfungsi sebagai perantara antara orang yang berzakat dan berinfaq dengan orang yang menerima zakat. Sedangkan dalam fungsi *tamwil*, *Baitul Maal Wa Tamwil* berfungsi sebagai perantara investor (kreditur) dengan peminjam (debitur). Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami jika *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan lembaga simpan pinjam.

Muhammad Ridwan (2014: 120) menyatakan bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial.

Peran sosial dapat dilihat dari definisi *baitul maal* sedangkan peran bisnis dilihat dari definisi *baitul tamwil*.

**b. Sejarah *Baitul Maal Wa Tamwil***

Menurut Muhammad Ridwan (2014: 67), lahirnya *Baitul Maal Wa Tamwil* dilatarbelakangi oleh kebutuhan usaha mikro/ kecil mengenai permodalan yang tidak mampu memenuhi prosedur perbankan. Pada tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia telah menginspirasi untuk kembali membangun perekonomian yang dapat sampai pada kalangan bawah. Namun Bank Muamalat Indonesia belum mampu mewujudkan kebutuhan usaha mikro/ kecil untuk mendapatkan permodalan karena terhalang oleh Undang- Undang. Misi keumatan Bank Muamalat Indonesia yang cukup besar ini kenyataannya mengalami kendala di lapangan. Contohnya mengenai sisi prosedur, plafon pembiayaan, dan lingkungan bisnis.

Menindaklanjuti keterbatasan- keterbatasan Bank Muamalat Indonesia ini maka dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun ternyata nama perkreditan dirasa kurang sesuai karena dalam Islam melayani pembiayaan bukan perkreditan. Selain itu kendala lain mengenai proses peminjaman baik dari segi hukum maupun teknis bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sama. Padahal inilah kendala umum yang dihadapi usaha mikro/ kecil.

Persoalan- persoalan di atas akhirnya memunculkan sebuah lembaga keuangan alternatif. Yaitu lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis namun juga sosial. Tidak hanya itu, namun juga lembaga yang dapat mendistribusikan kekayaannya secara merata dan adil. Lembaga yang mampu menolong kelompok usaha mikro/ kecil dan terlahir dari kesadaran umat. Lembaga keuangan tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*.

**c. Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil***

Menurut Muhammad Ridwan (2014: 124), *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya dalam prinsip- prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yaitu nilai- nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan, yaitu kesatuan pola pikir, sikap, dan cita- cita antar semua elemen.
- 5) Kemandirian, yaitu mandiri di atas semua golongan politik. Selain itu juga tidak bergantung pada dana- dana pinjaman dan bantuan.
- 6) Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang dilandasi dasar keimanan. Tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, namun juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Sikap profesional dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi pencapaian standar kerja tinggi.
- 7) Istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, berkelanjutan setelah mencapai suatu tahap maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

**d. Produk *Baitul Maal Wa Tamwil***

*Baitul Maal Wa Tamwil* dalam pelayanannya memiliki produk pembiayaan dan produk simpanan. Menurut Muhammad Ridwan (2014: 160), produk pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* dibedakan menurut pemanfaatannya dan menurut sifatnya. Produk pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* menurut pemanfaatannya dibagi menjadi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang- barang dan fasilitas- fasilitas permodalan. Sedangkan pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk pemenuhan dan peningkatan produksi dalam artian luas dan menyangkut seluruh sektor ekonomi.

Menurut sifatnya dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan penjualan, produksi, pertanian maupun jasa. Sedangkan pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik untuk sesaat maupun dalam jangka panjang (Muhammad Ridwan, 2014: 160).

Produk pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM)/ modal usaha merupakan salah satu pembiayaan produktif. Dalam pembiayaan produktif, masyarakat dapat memilih diantara 4 (empat) model pembiayaan dalam

*Baitul Maal Wa Tamwil*. Secara umum, keempat model pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut (Ahmad Sumiyanto, 2008: 152- 159):

1) Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

*Syirkah* berarti membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. *Syirkah* dapat pula diartikan sebagai persekutuan usaha untuk mengambil hak. Produk pembiayaan dengan prinsip *syirkah* dapat dilakukan dengan pola-pola sebagai berikut:

a) *Musyarakah*

Menurut Muhammad Ridwan (2014: 164), *musyarakah* merupakan kerjasama antara *Baitul Maal Wa Tamwil* dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua pihak dan kedua belah pihak bersepakat dalam hal keuntungan dan risiko. Penyertaan modal dari *Baitul Maal Wa Tamwil* ke dalam usaha anggota dilakukan setelah *Baitul Maal Wa Tamwil* mengetahui besarnya partisipasi modal dari anggota. Nisbah bagi hasil dalam akad *musyarakah* dihitung dari proporsi penyertaan modal. Anggota akan berbagi hasil dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* sesuai tingkat nisbahnya pada setiap periode akuntansi, keuntungan maupun kerugianpun ditanggung sesuai tingkat nisbah.

*Baitul Maal Wa Tamwil* dalam akad *musyarakah* pada dasarnya dapat terlibat aktif dalam aktifitas usaha anggota.

Namun jika *Baitul Maal Wa Tamwil* mengalami keterbatasan tenaga, dapat menyerahkan pengelolaan usaha sepenuhnya kepada anggota. Pengembalian modal dalam akad ini dilaksanakan setelah jatuh tempo, namun dapat pula diangsur. Pengembalian modal dengan cara diangsur menyebabkan partisipasi modal *Baitul Maal Wa Tamwil* semakin mengecil bahkan nol.

b) *Mudharabah*

Menurut Muhammad Ridwan (2014: 164), *mudharabah* merupakan hubungan kemitraan antara anggota dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* di mana modal usaha sepenuhnya dari *Baitul Maal Wa Tamwil*. Nisbah dalam akad ini disetujui setelah *Baitul Maal Wa Tamwil* mengevaluasi kelayakan usaha dalam proposal. Karena modal sepenuhnya dari *Baitul Maal Wa Tamwil* maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor di luar kemampuan manusia. Namun jika kerugian disebabkan oleh kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota maka *mudhorib* yang menanggung pengembalian modal pokoknya. Pembiayaan *mudharabah* biasanya dapat dijalankan untuk usaha- usaha yang memang sudah pasti.

## 2) Prinsip jual beli (*tijarah*)

Jual beli dapat diartikan sebagai menukar harta dengan harta maupun transaksi penukaran selain fasilitas (Ahmad Sumiyanto, 2008: 154). Prinsip jual beli dalam pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* dapat dikembangkan menjadi:

### a) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008: 154-), *murabahah* merupakan penjualan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Kemudian Muhammad Ridwan (2014: 162) menambahkan bahwa jual beli ini dapat berlaku untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. Keuntungan yang diambil dalam transaksi ini sifatnya konstan yang berarti tidak ada penambahan atau pengurangan, dan tidak ada kaitannya dengan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Dalam pembiayaan *murabahah* secara umum memiliki syarat- syarat:

- (1) *Baitul Maal Wa Tamwil* memberitahu harga pokok kepada anggota mengenai barang yang dimaksud.
- (2) Kontrak pertama harus sah terlebih dahulu sesuai rukun yang ditetapkan.
- (3) Kontrak bebas dari riba.
- (4) Penjual harus menjelaskan keadaan barang (cacat atau tidak) sesudah pembelian.
- (5) Jika pembelian dengan utang, maka penjual harus menjelaskan seluruh ketentuan yang berkaitan (Ahmad Sumiyanto, 2008: 155).

b) *Bai'as salam*

Muhammad Ridwan (2014: 163) menjelaskan *bai'as salam* merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. *Baitul Maal Wa Tamwil* terlebih dahulu menjelaskan dan melakukan kesepakatan dengan anggota mengenai jenis barang, mutu barang, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan, dan keuntungan.

c) *Bai'al istisnha*

Merupakan kontrak jual beli antara pembeli dengan *Baitul Maal Wa Tamwil*, dalam kontrak ini *Baitul Maal Wa Tamwil* mengusahakan pesanan tersebut dari orang lain. Setelah barang pesanan didapat, barulah *Baitul Maal Wa Tamwil* menjual barang tersebut kepada anggota pembeli. Mengenai pembayaran dan keuntungan harus disepakati lebih dulu oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* dan pembeli (Ahmad Sumiyanto, 2008: 156).

3) Prinsip sewa (*ijarah*)

Landasan transaksi *ijarah* ini adalah adanya pemindahan manfaat. Objek dalam transaksi *ijarah* ini adalah jasa. Pada akhir masa sewa, *Baitul Maal Wa Tamwil* dapat menjual barang yang disewakan kepada anggota. Mengenai harga sewa dan harga jual

dilakukan kesepakatan pada awal perjanjian (Ahmad Sumiyanto, 2008: 158).

#### 4) Prinsip jasa

Ahmad Sumiyanto (2008: 158) menjelaskan bahwa pembiayaan dengan prinsip jasa pada dasarnya menggunakan akad *ta'awuni* atau tolong-menolong. Di dalam akad ini muncul berbagai pengembangan yaitu sebagai berikut:

##### a) *Al wakalah*

Prinsip jasa yang dikembangkan menjadi *wakalah* berarti pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam hal ini menerima amanah investor yang akan menanamkan modalnya kepada anggota. Atas kepercayaan ini maka *Baitul Maal Wa Tamwil* dapat menerapkan *management fee* yang besarnya disepakati lebih dulu.

##### b) *Kafalah*

*Kafalah* berarti jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Jenis dalam *kafalah* ada berbagai jenis yaitu jaminan dengan benda, jaminan dengan nama baik, jaminan dengan uang, dan jaminan prestasi (Ahmad Sumiyanto, 2008: 158).

c) *Hawalah*

*Hawalah* berarti perpindahan, maksudnya yaitu memindahkan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang bersedia membayarnya (Muhammad Ridwan, 2014: 94). Kemudian Ahmad Sumiyanto (2008: 159) menambahkan bahwa dalam praktiknya, *hawalah* dapat terjadi pada:

- (1) *Factoring* atau anjak piutang, yakni anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada *Baitul Mal wa Tamwil* kemudian *Baitul Mal wa Tamwil* membayarnya kepada nasabah, lalu sebagai gantinya *Baitul Mal wa Tamwil* akan menagih kepada orang yang berhutang.
- (2) *Post date check*, yakni *Baitul Mal wa Tamwil* bertindak sebagai juru tagih atas piutang nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.
- (3) *Bill discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan *hawalah* pada umumnya.

d) *Rahn*

*Rahn* berarti menahan salah satu harta (bernilai ekonomis) milik peminjam untuk menjamin atas pembiayaan yang diterimanya. Dalam praktiknya *rahn* dibagi menjadi dua kemungkinan, yaitu produk pelengkap dan produk tersendiri. Produk pelengkap berarti hanya dijadikan alternatif

pengikatan jaminan akad pembiayaan lain. Sedangkan produk tersendiri berarti dapat dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan (Ahmad Sumiyanto, 2008: 159).

## **9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

### **a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga saat ini masih diartikan menurut berbagai pandangan. Di Indonesia, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kekayaan bersih ini terpisah dari tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain dilihat dari segi kekayaan dan hasil penjualan, usaha mikro adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 1- 4 orang (Badan Pusat Statistik).
- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri oleh orang perorangan atau badan usaha mandiri. Kekayaan bersih usaha kecil berkisar antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah, terpisah dari tanah dan tempat bangunan. Usaha kecil memiliki hasil penjualan bersih tahunan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan jumlah tenaga kerja, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa usaha kecil memiliki tenaga kerja 5- 19 orang.

- 3) Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, oleh orang perorangan atau badan usaha mandiri. Kekayaan bersih usaha menengah berkisar antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), terpisah dari tanah dan bangunan. Usaha menengah memiliki hasil penjualan bersih tahunan antara Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000,00. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa usaha kecil memiliki tenaga kerja 20- 99 orang.

#### **b. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dilihat dari pasal 3, yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Maka dari pasal ini dapat diartikan bahwa peran peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu membantu pembangunan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menyerap tenaga kerja.

Tulus Tambunan (2002: 21) juga memberikan penjelasan yang sama dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) , bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja dan PDB. Kontribusi terhadap kesempatan kerja dinyatakan atas dasar bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat berlimpah namun usaha besar tidak sanggup menyerap semua pencari pekerjaan. Ketidaksanggupan usaha besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang besar disebabkan karena pada umumnya kelompok usaha tersebut relatif padat modal, sedangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) relatif padat karya. Selain itu, umumnya usaha besar membutuhkan pekerja dengan pendidikan formal yang tinggi dan pengalaman kerja yang cukup, sedangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagian pekerjaanya berpendidikan rendah.

Struktur kontribusi PDB menunjukkan bahwa usaha kecil di Indonesia masih lebih kuat di sektor pertanian, bukan sektor industri. Usaha kecil dominan di beberapa sektor seperti pertanian dan perdagangan, sektor hotel dan restoran dengan pangsa PDBnya di atas 50 persen (Tulus Tambunan, 2002: 26).

Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian dinilai sangat membantu khususnya di negara sedang berkembang. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kekurangan, namun beberapa keunggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

**c. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Menurut Tulus Tambunan (2002: 80- 81), perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari masalah yang tingkat intensitas dan sifatnya berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, namun juga berbeda antarwilayah/ lokasi, antarsentra, antarsektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/ sektor yang sama. Namun demikian, ada beberapa masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan/ atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik namun dengan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi modern, SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknis produksi), dan informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi).

**d. Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pemerintah sebagai pihak yang turut andil dalam pengembangan UMKM memprioritaskan pengembangan usaha melalui kebijakan:

- 1) Pemberian kesempatan kepada UMKM untuk turut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 2) Pencadangan usaha bagi UMKM dengan pembatasan usaha besar.
- 3) Kemudahan dalam perizinan.
- 4) Penyediaan pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi teknologi dan informasi (PP No. 17 Tahun 2013 tentang UMKM).

**10. Hubungan Unit Simpan Pinjam dan *Baitul Maal Wa Tamwil* dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Unit Simpan Pinjam (USP) dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) memiliki hubungan erat dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hubungan tersebut dapat berupa hubungan sosial maupun ekonomi.

Hubungan sosial antara Unit Simpan Pinjam (USP), *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), dan UMKM terjadi karena ketiganya berada pada lokasi yang berdekatan. Umumnya pelaku UMKM akan mencari pembiayaan atau bantuan terkait usahanya kepada Unit Simpan Pinjam (USP) ataupun *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang berada dalam satu

wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiganya berada dalam satu wilayah sosial.

Dari segi hubungan ekonomi, USP dan BMT berada pada wilayah UMKM dapat tumbuh dan berkembang. USP dan BMT kemudian memberikan produk untuk dapat membantu pengembangan UMKM berupa pembiayaan yang disertai pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan harapan agar pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM digunakan untuk pengembangan usaha.

Apabila USP dan BMT berada pada wilayah yang sama maka sasaran dari keduanya adalah UMKM yang berada dalam satu wilayah tersebut. Hal ini berarti bahwa USP dan BMT memiliki kaitan yang erat dan dapat saling memengaruhi.

USP dan BMT sama-sama membantu perkembangan UMKM, akan tetapi mereka memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip dasar yang melandasi usahanya. USP menjalankan usahanya dengan prinsip konvensional yang memperbolehkan adanya praktik bunga sedangkan BMT menjalankan usaha dengan prinsip syariah dengan praktik bagi hasil. Perbedaan ini menjadikan pengembangan UMKM akan sesuai dengan arah dari pengawasan dan pembinaan pemberi pembiayaannya.

## **11. Persepsi**

### **a. Pengertian Persepsi**

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses kognitif dari setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Kunci memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi adalah penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Miftah Thoha, 2014: 141- 142).

Bimo Walgito (1997: 53) menambahkan bahwa persepsi adalah proses yang didahului oleh penginderaan yang kemudian diteruskan ke otak. Setelah sampai pada otak maka terjadilah proses psikologis yaitu mengalami persepsi.

### **b. Syarat Terjadinya Persepsi**

Bimo Walgito (1997: 54) menyatakan bahwa persepsi terjadi jika terpenuhinya syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya obyek yang dipersepsi.
- 2) Adanya alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus.
- 3) Adanya perhatian yang merupakan persiapan mengadakan persepsi.

### **c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miftah Thoha (2014: 154) adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal tersebut antara lain: proses belajar, motivasi, dan kepribadian.
- 2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar akibat adanya pengaruh lingkungan luar. Faktor eksternal tersebut antara lain:

intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan, dan ketidakasingan.

**d. Persepsi terhadap Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah**

Persepsi terhadap peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah berarti penafsiran subyektif dari seseorang terhadap peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah. Hal- hal yang ditafsirkan akan berbeda pada setiap orang, perbedaan ini dapat terjadi karena perhatian yang berbeda terhadap stimulus dalam mempersiapkan persepsi.

Persepsi terhadap peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah erat kaitannya dengan faktor- faktor yang menyebabkan seseorang memilih USP KUD Subur atau BMT Nur Rahmah. Di Kecamatan Semin, faktor- faktor seseorang memilih USP KUD Subur antara lain kemudahan prosedur ketika mengajukan pinjaman daripada di bank, dapat melayani pinjaman dalam jumlah lebih kecil daripada bank, bunga pinjaman yang lebih kecil daripada bank, adanya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan didapatkan sebagai balas jasa, dan adanya asas kekeluargaan karena berbentuk koperasi. Pada BMT Nur Rahmah, faktor- faktor seseorang memilih BMT Nur Rahmah hampir sama dengan USP KUD Subur, bedanya terletak pada bagi hasil yang diterapkan di BMT Nur Rahmah. Orang yang menghindari sistem bunga lebih memilih BMT Nur Rahmah daripada USP KUD Subur.

## B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Indah Komala Sari Siregar (2013) dalam skripsi berjudul “Studi Komparatif Peran Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama dan BMT Insani dalam Pengembangan UMK di Kota Padangsidimpuan”. Teknik analisis data menggunakan Uji U Test (*The Mann-Whitney Test*). Hasil penelitian menunjukkan variabel modal dan omset per bulan terdapat perbedaan antara KSP Bina Bersama dan BMT Insani terhadap pengembangan usaha. Variabel pengembangan kemitraan, perlindungan usaha, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menunjukkan tidak ada perbedaan antara KSP Bina Bersama dan BMT Insani terhadap pengembangan usaha. Persamaan penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti komparasi peran lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional terhadap pengembangan UMKM. sama-sama menggunakan omset untuk mengukur perkembangan usaha. Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menggunakan KSP sebagai lembaga keuangan mikro konvensional sedangkan penelitian sekarang menggunakan USP. Variabel pada penelitian terdahulu menggunakan modal, omset, pengembangan kemitraan, perlindungan usaha, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel pembinaan, pengawasan, dan tingkat kesejahteraan.
2. Penelitian oleh Fika Tri Utami (2104) dalam skripsi berjudul “Studi Perbandingan Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha dan

Pendapatan Nasabah di BMT Bina Umat Sejahtera dan KSP Mitra Tani Mandiri Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan”. Teknik analisis data menggunakan *Independent Sampel t Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara nasabah BMT dan nasabah Koperasi, nasabah BMT dan nasabah Koperasi mengalami perbedaan dalam pembiayaan, perkembangan usaha (omset) sebelum maupun sesudah pembiayaan. Persamaan penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti komparasi perkembangan usaha yang mendapat pembiayaan dari koperasi syariah dan koperasi konvensional dengan teknik analisis data menggunakan *Independent Sampel t Test*. Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menggunakan KSP sebagai koperasi konvensional, penelitian sekarang menggunakan USP. Variabel pada penelitian terdahulu menggunakan omset dan laba sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel pembinaan, pengawasan, dan tingkat kesejahteraan.

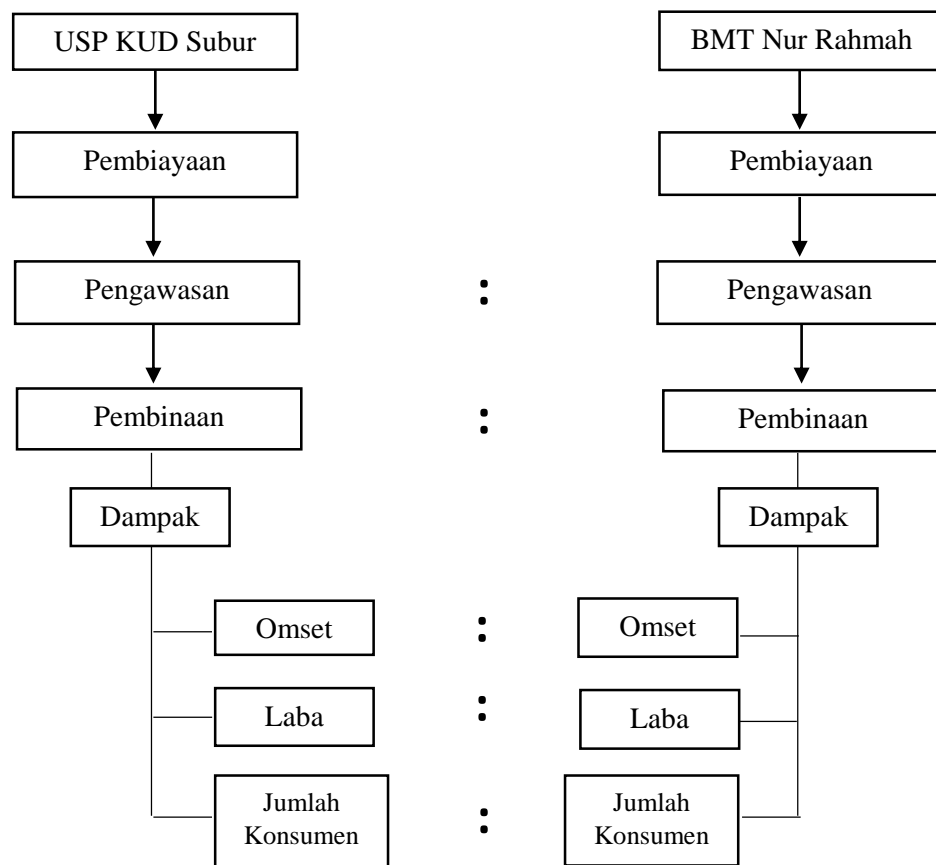
3. Penelitian oleh Fitra Ananda (2011) dalam skripsi berjudul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang”. Teknik analisis data menggunakan Uji Pangkat Tanda *Wilcoxon*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang maka modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan yang sangat

berarti. Persamaan penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini adalah sama- sama meneliti perkembangan usaha. Perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan Mudharabah sedangkan penelitian saat ini menggunakan pembiayaan- pembiayaan dari BMT dan USP. Penelitian terdahulu menggunakan variabel modal sedangkan sekarang variabel pembinaan, pengawasan, dan tingkat kesejahteraan.

### **C. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini bertujuan membandingkan peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Semin. Perkembangan UMM kini semakin pesat. Keberadaannya menyumbangkan kontribusi positif terhadap PDB dan tenaga kerja, Namun ternyata UMKM masih mengalami permasalahan khususnya permodalan.

Keberadaan USP dan BMT sebagai lembaga keuangan yang merupakan salah satu pendekatan pengembangan UMKM dapat memberikan bantuan modal melalui pembiayaan. Adanya pembiayaan yang diberikan oleh dua lembaga keuangan yang berbeda akan ada perbedaan pada pelaksanaan pengawasan dan pembinaan. Akhir dari pemberian pembiayaan yang disertai pengawasan dan pembinaan adalah peningkatan omset, laba, dan jumlah konsumen sebagai dampak adanya peran dari USP dan BMT. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir

#### **D. Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan tinjauan dan kajian pada penelitian yang relevan, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji kebenarannya secara empiris adalah:

1. Terdapat perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah.
2. Terdapat perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah.

3. Terdapat perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk data penelitian berupa angka- angka dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2013: 12).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2015: 29). Berdasarkan tingkat eksplanasinya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian komparatif. Dadang Kuswana (2011: 42), menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan di KUD Subur, BMT Nur Rahmah, dan UMKM wilayah Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada 9 Mei 2016 hingga 26 Mei 2016.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015: 61).

Sesuai dengan masalah yang diteliti populasi dalam penelitian ini adalah anggota KUD Subur yang mengambil pembiayaan dari USP KUD Subur untuk kegiatan pengembangan UMKM sebanyak 974 anggota dan anggota BMT Nur Rahmah yang mengambil pembiayaan dari BMT Nur Rahmah untuk kegiatan pengembangan UMKM sebanyak 550 anggota.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015: 62). Penelitian ini menggunakan teknik *Cluster Quota Random Sampling*. Teknik *Cluster Random Sampling* ini digunakan ketika populasi terdiri atas kelompok- kelompok individu atau *cluster* (Nurul Zuriah, 2007: 124). Tahap pertama pada penelitian ini adalah membagi populasi menjadi dua *cluster*.

*Quota Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri- ciri tertentu dengan memberi batasan kuota (Sugiyono, 2013: 122). Pada teknik ini populasi tidak diperhitungkan namun diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah kuota pada setiap kelompoknya (Nurul Zuriah, 2007: 124). Tahap kedua pada penelitian ini adalah membatasi kuota pada masing- masing *cluster*.

Jadi, pada penelitian ini populasi dibagi menjadi *cluster* UMKM penerima pembiayaan dari USP KUD Subur dan *cluster* UMKM penerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah. Berdasarkan masing- masing *cluster* kemudian ditentukan kuota sebanyak 60 sampel. Selanjutnya sampel secara

acak diambil dari masing- masing *cluster* dengan cara diundi. Dengan demikian jumlah sampel ada 120 UMKM.

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat mengenai berbagai hal yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 59). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah peran pengawasan, peran pembinaan, dan pengembangan UMKM.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan arah pada penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional atas variabel penelitian sebagai berikut:

##### **1. Peran Pengawasan**

Peran pengawasan dalam penelitian ini merupakan keterlibatan USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam upaya pengamatan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (UMKM) di Kecamatan Semin agar benar- benar digunakan untuk mengembangkan UMKM. Pengawasan dilakukan melalui pengamatan terhadap informasi di lapangan pada saat kunjungan rutin/ dadakan dan laporan rutin yang dilakukan pihak UMKM terhadap USP KUD Subur maupun BMT Nur Rahmah. Adapun pengawasan dalam penelitian ini diambil dari persepsi UMKM penerima pembiayaan.

## 2. Peran Pembinaan

Peran pembinaan dalam penelitian ini merupakan pengarahan dan pembimbingan yang dilakukan oleh USP KUD Subur maupun BMT Nur Rahmah terhadap UMKM setelah pembiayaan diberikan. Pembinaan dilakukan dengan cara memberi bimbingan dan pelatihan kepada UMKM. Adapun pembinaan dalam penelitian ini diambil dari persepsi UMKM penerima pembiayaan.

## 3. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM adalah upaya yang dilakukan koperasi untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian pembiayaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pembiayaan yang diberikan tersebut untuk meningkatkan kemampuan UMKM. Dalam penelitian ini pengembangan UMKM dilihat dari dampak adanya peran pemberian pembiayaan yang disertai pengawasan dan pembinaan dari USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah terhadap UMKM bersangkutan. Adapun dampak peran dalam penelitian ini diambil dari persepsi UMKM penerima pembiayaan. Dampak pengawasan dan pembinaan terhadap UMKM yang menerima pembiayaan ini dilihat dari peningkatan kemampuan UMKM dengan menggunakan indikator omset, laba, dan jumlah konsumen UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari USP KUD maupun BMT Nur Rahmah. Omset adalah total barang yang terjual, dihitung dengan mengalikan jumlah yang terjual dengan harga. Laba adalah keuntungana yang diperoleh UMKM dihitung dengan cara mengurangi total omset dengan biaya

operasional. Jumlah konsumen adalah orang yang membeli produk/ barang dari UMKM.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara pengisian kuesioner dan dokumentasi.

### **1. Kuesioner (angket)**

Sugiyono (2013: 142) menyatakan bahwa kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data responden dan keadaan umum responden. Terdapat dua angket dalam penelitian ini, yaitu angket untuk UMKM nasabah BMT dan angket untuk UMKM nasabah USP. Bobot dalam masing- masing angket adalah sama. Kedua angket tersebut sama- sama terdiri atas bagian yang berisi data dan keadaan umum responden, dan peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah terhadap pengembangan UMKM.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan data sekunder yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2013: 274). Objek dalam metode dokumentasi adalah benda mati. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mencari data jumlah nasabah yang

menerima pembiayaan di BMT Nur Rahmah maupun di USP KUD Subur dan data monografi penduduk setiap kelurahan di Kecamatan Semin.

### G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena baik alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena yang diamati disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2013: 102). Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, di mana responden memilih jawaban yang telah tersedia. Adapun sebelum membuat instrumen terlebih dahulu membuat kisi- kisi instrumen. Berikut adalah kisi- kisi instrumen dalam penelitian ini:

Tabel 3. Kisi- kisi instrumen penelitian

No.	Variabel	Indikator	Deskriptor	No. Item
1.	Gambaran umum Responden	a. Nama b. Umur c. Jenis kelamin d. Pendidikan terakhir e. Status perkawinan f. Jenis usaha g. Tempat usaha h. Kegiatan usaha i. Alasan menjadi wirausahawan j. Jumlah pembiayaan	1. Nama responden 2. Umur responden 3. Jenis kelamin responden 4. Pendidikan terakhir responden 5. Status perkawinan responden 6. Jenis usaha responden 7. Tempat melaksanakan usaha responden 8. Kegiatan usaha responden 9. Alasan responden berwirausaha 10. Jumlah yang diterima terakhir	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.	Pegawasan	1. Pengawasan preventif 2. Pengawasan langsung	1. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) meneliti terlebih dahulu kegiatan yang akan diberikan pembiayaan 2. Pengawasan dari (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) dilakukan sejak pengajuan prosedur pembiayaan 3. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan secara langsung 4. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) melakukan pengawasan terhadap kegiatan	1, 2 3, 4, 5

		<p>3. Pengawasan tidak langsung</p> <p>4. Pernyataan nasabah</p>	<p>pembiayaan dengan berkunjung secara berkala</p> <p>5. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan cara kunjungan mendadak</p> <p>6. Saya melakukan laporan rutin ke (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) guna memudahkan pengawasan</p> <p>7. Saya merasa keberatan dengan pengawasan kegiatan pembiayaan ini</p>	<p>6</p> <p>7</p>
3.	Pembinaan	<p>5. Pembiayaan disertai pembinaan</p> <p>6. Bimbingan bidang produksi</p> <p>7. Bimbingan jaringan pasar</p> <p>8. Frekuensi Bimbingan</p> <p>9. Cara bimbingan</p>	<p>8. Pembiayaan yang diberikan (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) disertai pembinaan usaha</p> <p>9. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) melakukan bimbingan bidang produksi sebagai bentuk pembinaan</p> <p>10. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) melakukan bimbingan cara memproduksi barang sebagai bentuk pembinaan</p> <p>11. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) melakukan bimbingan jaringan pemasaran sebagai bentuk pembinaan</p> <p>12. Bimbingan dari (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) dilakukan secara berkala</p> <p>13. Bimbingan dari (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) secara berkelompok</p> <p>14. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) memberikan pelatihan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan pengembangan UMKM</p> <p>15. Pelatihan usaha dilakukan hanya pada kelompok usaha tertentu saja</p> <p>16. (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) bekerjasama dengan pihak luar (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) dalam program pelatihan usaha</p>	<p>8</p> <p>9, 10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13, 14, 15, 16</p>
4.	Pengembangan	10. Omset penjualan	<p>17. Bantuan pengembangan UMKM dari (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) menyebabkan omset penjualan saya meningkat</p> <p>18. Omset penjualan yang meningkat terjadi karena variasi</p>	<p>17, 18</p>

		11. Laba usaha	barang dalam UMKM saya bertambah	
			19. Bantuan pengembangan UMKM dari (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) menyebabkan laba pada UMKM saya meningkat	19, 20
		12. Jumlah konsumen	20. Laba usaha pada UMKM tidak saya gunakan untuk mengembangkan usaha Laba usaha pada UMKM tidak saya gunakan untuk mengembangkan usaha	
			21. Bantuan pengembangan UMKM dari (USP KUD Subur/ BMT Nur Rahmah) menyebabkan jumlah konsumen pada UMKM saya meningkat	21, 22
			22. Jumlah konsumen yang meningkat pada UMKM tidak menyebabkan laba juga meningkat	

Penetapan skor instrumen kuesioner dalam penelitian menggunakan skala likert dengan skor jawaban sebagai berikut:

Tabel 4. Skor Alternatif Jawaban

Alternatif Jawaban	Skor untuk Pernyataan	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju	4	1
Setuju	3	2
Tidak Setuju	2	3
Sangat Tidak Setuju	1	4

## H. Uji Coba Penelitian

### 1. Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2013: 211). Instrumen penelitian yang baik salah satu syaratnya adalah valid. Instrumen yang valid berarti

alat ukur yang digunakan untuk mencari data dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013: 172).

Penelitian ini menggunakan pendapat para ahli (*expert judgement*) sebagai uji validitas. Para ahli diminta pendapatnya mengenai instrumen yang telah disusun (Sugiyono, 2013: 177). Setelah mendapatkan pendapat dari para ahli kemudian dilakukan tindakan selanjutnya. Tindakan tersebut bergantung dari pendapat yang dikemukakan dari para ahli.

## **I. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Normalitas Data**

Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui distribusi data, berbentuk normal atau tidak normal. Uji normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila nilai signifikansinya lebih dari sama dengan 0,05 maka data berdistribusi normal namun bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal (Ali Muhson, 2012: 21).

### **2. Uji *Independen t Test***

*Independen t Test* digunakan untuk menguji perbedaan rata dua sampel yang saling bebas. Sebelum melakukan pengujian data dengan *Independen t Test*, terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas. Jika nilai signifikansi pengujian F kurang dari 0,05 maka varians kedua kelompok tidak homogen sehingga menggunakan uji *separate t test*. Sedangkan jika nilai signifikansi pengujian F lebih dari sama dengan 0,05 maka varians

kedua kelompok homogen sehingga pengujian dilakukan dengan *pooled t test* (Ali Muhson, 2012: 4- 5).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian bab ini akan diajikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya. Secara garis besar akan diuraikan dalam sub-bab gambaran umum daerah penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### **1. Letak dan Luas Daerah**

Kecamatan Semin merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Semin terdiri atas 10 desa, yaitu: Semin, Pundungsari, Karangsari, Rejosari, Bulurejo, Bendung, Sumberejo, Candirejo, Kalitekuk, dan Kemejing. Kecamatan Semin merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Semin berbatasan dengan:

Sebelah Barat : Kecamatan Ngawen

Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Sebelah Timur : Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

Sebelah Selatan : Kecamatan Ponjong dan Kecamatan  
Karangmojo

Wilayah Kecamatan Semin seluas 78,92 km<sup>2</sup> atau 5,31 persen dari seluruh wilayah daratan Kabupaten Gunungkidul. Wilayah Kecamatan Semin terdiri atas lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah, dan lahan nonpertanian. Kecamatan Semin didominasi oleh lahan kering.

Lahan kering yang ada dimanfaatkan sebagai lahan pertanian nonsawah, pemukiman, tempat usaha, hutan negara, dan jalan.

## **2. Keadaan Demografi Masyarakat**

### **a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Penduduk Kecamatan Semin terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk Kecamatan Semin berdasarkan jenis kelamin tahun 2015 sebanyak 50.723 jiwa yang terdiri dari 24.556 (48,41%) penduduk laki-laki dan 26.167 (51,58%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Semin sebanyak 9.967 jiwa dengan kepadatan penduduk 829 jiwa per 1 km<sup>2</sup>. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Kemejing dengan 3.167 jiwa dengan kepadatan penduduk 720 jiwa per km<sup>2</sup>. (gunungkidulkab.bps.go.id).

### **b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Berdasarkan umur, penduduk Kecamatan Semin dikelompokkan menjadi tiga, yaitu penduduk umur 0-14 tahun, penduduk umur 15- 64 tahun, dan penduduk umur 65 tahun lebih. Umur 0- 14 tahun dan 65 tahun lebih biasa disebut dengan penduduk umur nonproduktif sedangkan usia 15- 64 tahun biasa disebut penduduk umur produktif. Berikut ini adalah tabel mengenai komposisi penduduk Kecamatan Semin menurut kelompok umur.

Tabel 5. Penduduk Kecamatan Semin menurut Kelompok Umur

	<b>Jumlah Penduduk</b>			
	0 – 14 Tahun	15 – 64 Tahun	65 Tahun +	Total
<b>Jumlah</b>	3.429	42.906	4.388	50.723
<b>Persentase (%)</b>	6,76%	84,58%	8,65%	100%

Sumber: gunungkidulkab.bps.go.id (diolah)

Tabel 5 menunjukkan bahwa umur produktif di Kecamatan Semin merupakan kelompok umur terbanyak, yaitu mencapai 84,58%. Kelompok umur 65 tahun ke atas menempati urutan kedua yaitu sebesar 8,65% dan kelompok umur paling sedikit adalah kelompok 0-14 tahun sebesar 6,76%.

c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk Kecamatan Semin dikategorikan menjadi penduduk yang tamat TK, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA/ SMK, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Banyaknya Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Kecamatan Semin Tahun 2015

	<b>Pendidikan</b>						
	TK	SD	SMP	SMA/ SMK	D1 – D3	S1	S2 – S3
<b>Jumlah</b>	3.470	14.001	7.013	7.289	1.036	759	100
<b>Persentase (%)</b>	10,30%	41,58%	20,82%	23,25%	3,07%	2,25%	0,29%

Sumber: data monografi desa Kecamatan Semin (diolah)

Tabel 6 menunjukkan bahwa penduduk yang tamat SD menduduki urutan tertinggi yaitu sebanyak 14.001 orang atau 41,58%.

Disusul oleh penduduk yang tamat SMA/ SMK sebanyak 7.289 orang atau 23,25%, kemudian penduduk yang tamat SMP sebanyak 7.013 orang atau 20,82%, TK sebanyak 3.470 orang atau 10,30%. Penduduk Kecamatan Semin yang tamat di atas SMA/ SMK tidak sampai 10%, yaitu tamat D1 hingga D3 sebanyak 1.036 orang atau 3,07%, S1 sebanyak 759 orang atau 2,25%, dan paling sedikit adalah tamatan Pascasarjana sebanyak 100 orang atau 0,29%.

d. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk Kecamatan Semin terdiri dari 14 jenis pekerjaan. Komposisi penduduk Kecamatan Semin menurut mata pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian  
Kecamatan Semin Tahun 2015

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	PNS	563	1,86 %
2.	TNI/ POLRI	44	0,14 %
3.	Karyawan	2.817	9,34 %
4.	Pedagang	4.054	13,44 %
5.	Petani	16.041	53,18 %
6.	Tukang	730	2,42 %
7.	Buruh	2.901	9,61 %
8.	Pensiunan	298	0,98 %
9.	Peternak	351	1,16 %
10.	Jasa	303	1,00 %
11.	Pengrajin	714	2,36 %
12.	Pekerja Seni	88	0,29 %
13.	Sopir	42	0,13 %
14.	Lainnya	1.213	4,02 %

Sumber: Data monografi desa Kecamatan Semin (diolah)

Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Semin bermata pencapaian sebagai petani. Terbukti dengan adanya

16.041 orang atau 53,18% yang menjadi petani. Keadaan ini didukung oleh keadaan topografi wilayah Kecamatan Semin yang sebagian adalah daerah bukit kering yang dimanfaatkan sebagai kebun atau tegalan. Selain kebun dan tegalan, wilayah Kecamatan Semin juga didominasi oleh sawah tadah hujan. Mata pencaharian yang menempati posisi kedua terbanyak setelah menjadi petani adalah menjadi pedagang dengan jumlah 4.054 orang atau 13,44%. Penduduk Kecamatan Semin yang menjadi buruh sebanyak 2.901 orang atau 9,61%, menjadi karyawan sebanyak 2.817 atau 9,34%, pekerjaan lain sebanyak 1.213 orang atau 4,02%, menjadi tukang sebanyak 730 orang atau 2,42%, menjadi pengrajin sebanyak 714 orang atau 2,36%, menjadi PNS sebanyak 563 orang atau 1,86%, menjadi peternak sebanyak 351 orang atau 1,16%, bekerja di bidang jasa sebanyak 303 orang atau 1%, pensiunan sebanyak 298 orang atau 0,98%, menjadi pekerja seni sebanyak 88 orang atau 0,29%, menjadi TNI/ POLRI sebanyak 44 orang atau 0,14%, dan paling sedikit yaitu menjadi sopir 42 orang atau 0,13%.

e. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan banyaknya penduduk (jiwa) yang tinggal di setiap luas wilayah 1 km<sup>2</sup>. Total penduduk Kecamatan Semin sebanyak 50.723 dengan wilayah seluas 78,92 km<sup>2</sup>. Adanya data ini maka kepadatan penduduk di Kecamatan Semin pada tahun 2015 adalah 643 jiwa per km<sup>2</sup>. Artinya bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah

Kecamatan Semin dihuni oleh 643 jiwa ([gunungkidulkab.bps.go.id](http://gunungkidulkab.bps.go.id)). Dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang luas wilayahnya mencapai 3.185,80 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 3.666.533 jiwa. Kepadatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 1.150 jiwa per km<sup>2</sup> ([yogyakarta.bps.go.id](http://yogyakarta.bps.go.id)).

Perbedaan kepadatan penduduk yang jauh antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kecamatan Semin ini terjadi karena Yogyakarta merupakan pusat kota dan pemerintahan provinsi, selain itu juga tempat di mana banyak perguruan tinggi yang tentunya menjadi daya tarik orang untuk tinggal di Yogyakarta. Sementara Kecamatan Semin merupakan daerah di Kabupaten Gunungkidul yang bukan pusat kota Kabupaten Gunungkidul, fasilitas yang sangat jauh berbeda dengan kota Yogyakarta sehingga daya tarik untuk tinggal di Kecamatan Semin tidak sebesar di Yogyakarta.

## **B. Karakteristik Responden**

Pembahasan berikut menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh dalam penelitian. Data hasil penelitian diperoleh dari angket yang diedarkan kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu 60 nasabah BMT Nur Rahmah Kecamatan Semin dan 60 nasabah USP KUD Subur Kecamatan Semin yang mengambil pembiayaan untuk pengembangan usaha.

### **1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelaminnya, responden penelitian nasabah USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu

laki-laki dan perempuan. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Koperasi	Jumlah Responden			% L	% P	% Total
	L	P	Jumlah			
USP KUD Subur	47	13	60	78%	22%	100%
BMT Nur Rahmah	15	45	60	25%	75%	100%

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa responden laki-laki nasabah USP KUD Subur sebanyak 47 orang (78%) dari total responden, sedangkan responden perempuan sebanyak 13 orang (22%) dari total responden. Tabel 8 juga menunjukkan bahwa responden laki-laki nasabah BMT Nur Rahmah sebanyak 15 orang (25%) dari total responden, sedangkan responden perempuan sebanyak 45 orang (75%) dari total responden. Berdasarkan tabel 8 maka dapat disimpulkan bahwa pemilik UMKM di Kecamatan Semin dari nasabah USP KUD Subur didominasi oleh laki-laki sedangkan pemilik UMKM dari nasabah BMT Nur Rahmah didominasi oleh perempuan.

## 2. Karakteristik Responden berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, responden USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dikelompokkan menjadi lima kelompok. Adapun responden USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah berdasarkan umur disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9. Karakteristik Responden berdasarkan Umur

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Koperasi</b>		<b>Persentase (%)</b>	
	<b>USP KUD Subur</b>	<b>BMT Nur Rahmah</b>	<b>USP KUD Subur</b>	<b>BMT Nur Rahmah</b>
21- 30	2	2	3%	3%
31- 40	6	7	10%	12%
41- 50	17	21	28%	35%
51- 60	32	28	54%	46%
61- 70	3	3	5%	5%
Jumlah	60	60	100%	100%

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa adanya keragaman umur pada responden penelitian. Responden penelitian nasabah USP KUD Subur terbanyak adalah kelompok umur 51- 60 tahun yaitu 32 orang (54%). Disusul oleh kelompok umur 41- 50 tahun yaitu sebanyak 17 orang (28%), kelompok umur 31- 40 tahun sebanyak 6 orang (10%), kelompok umur 61- 70 tahun sebanyak 3 orang (5%), dan terakhir kelompok umur 21- 30 tahun yaitu 2 orang (3%). Responden penelitian nasabah BMT Nur Rahmah terbanyak adalah kelompok umur 51- 60 tahun yaitu 28 orang (46%). Disusul oleh kelompok umur 41- 50 tahun yaitu sebanyak 21 orang (35%), kelompok umur 31- 40 tahun sebanyak 7 orang (12%), kelompok umur 61- 70 tahun sebanyak 3 orang (5%), dan terakhir kelompok umur 21- 30 tahun yaitu 2 orang (3%). Berdasarkan tabel 9 maka dapat disimpulkan bahwa pemilik UMKM di Kecamatan Semin dari nasabah USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah didominasi oleh kelompok umur 51- 60 tahun.

### 3. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikannya, responden USP KUD Subur dapat dikelompokkan menjadi kelompok SMP, SMA/ SMK, Diploma, dan Sarjana. Sementara itu, tingkat pendidikan responden BMT Nur Rahmah dapat dikelompokkan menjadi SD, SMP, dan SMA/ SMK. Adapun banyaknya responden USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 10. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Koperasi		Persentase (%)	
	USP KUD Subur	BMT Nur Rahmah	USP KUD Subur	BMT Nur Rahmah
SD	-	15	-	25%
SMP	22	26	37%	43%
SMA/ SMK	35	19	58%	32%
D3	2	-	3%	-
S1	1	-	2%	-
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 10 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden beragam. Responden terbanyak dari responden USP KUD Subur adalah lulusan SMA/ SMK yaitu sebanyak 35 orang (58%). Disusul oleh lulusan SMP sebanyak 22 orang (37%), lulusan D3 sebanyak 2 orang (3%), dan paling sedikit adalah lulusan S1 yaitu 1 orang (2%). Tingkat pendidikan responden dari BMT Nur Rahmah terbanyak adalah lulusan SMP yaitu sebanyak 26 orang (43%). Disusul oleh lulusan SMA/ SMK sebanyak 19 orang (32%), dan paling sedikit adalah lulusan SD yaitu 15 orang (25%).

Berdasarkan tabel 10 maka dapat disimpulkan bahwa pemilik UMKM di Kecamatan Semin dari nasabah USP KUD Subur didominasi oleh mereka yang tamat pendidikan SMA/ SMK. Sedangkan dari nasabah BMT Nur Rahmah didominasi oleh mereka yang tamat pendidikan SMP.

#### 4. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya, banyak keragaman jenis usaha pada responden penelitian. Adapun banyaknya responden USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah berdasarkan jenis usaha disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 11. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha

No.	USP KUD Subur			BMT Nur Rahmah		
	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1.	Warung kelontong	6	10%	Warung kelontong	11	18,33%
2.	Usaha makanan	11	18,33%	Pedagang nonmakanan	6	10%
3.	Foto kopi & percetakan	4	6,66%	Usaha makanan	21	35%
4.	Kerajinan	14	23,33%	Kerajinan	1	1,66%
5.	Perkakas	3	5%	Pengepul & barang bekas	6	10%
6.	Alat pertanian	5	8,33%	Dagang ayam	1	1,66%
7.	Bengkel	4	6,66%	Bengkel	1	1,66%
8.	Ternak	4	6,66%	Ternak	11	18,33%
9.	Pedagang daging	4	6,66%	Penggilingan padi	1	1,66%
10.	Penjahit	1	1,66%	Penjahit	1	1,66%
11.	BTL PLN	3	5%	-	-	-
12.	Pedagang kayu	1	1,66%	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 11 menunjukkan bahwa jenis usaha responden USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah banyak ragamnya. Jenis usaha terbanyak

dari nasabah USP KUD Subur yaitu usaha kerajinan sebanyak 14 orang (23,33%). Disusul jenis usaha makanan dengan 11 orang (18,33%), usaha warung kelontong 6 orang (10%), usaha alat pertanian 5 orang (8,33%), usaha foto kopi & percetakan, bengkel, ternak, dan pedagang daging masing-masing 4 orang (6,66%), usaha perkakas dan BTL PLN masing-masing 3 orang (5%). Jenis usaha responden USP KUD Subur paling sedikit yaitu usaha jahit dan dagang kayu masing-masing 1 orang (1,66%).

Jenis usaha responden BMT Nur Rahmah yang terbanyak adalah usaha makanan dengan 21 orang (35%). Disusul oleh jenis usaha warung kelontong dan ternak masing-masing 11 orang (18,33%), usaha dagang nonmakanan dan pengepul & barang bekas masing-masing 6 orang (10%). Jenis usaha responden BMT Nur Rahmah paling sedikit yaitu usaha kerajinan, dagang ayam, bengkel, penggilingan padi, dan penjahit masing-masing 1 orang (1,66%).

## 5. Karakteristik Responden berdasarkan Kegiatan Usaha

Berdasarkan kegiatan usahanya, responden penelitian nasabah USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu pekerjaan pokok dan sambilan. Berikut adalah tabel yang menyajikan karakteristik responden berdasarkan kegiatan usahanya.

Tabel 12. Karakteristik Responden berdasarkan Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha	Koperasi		Persentase (%)	
	USP KUD Subur	BMT Nur Rahmah	USP KUD Subur	BMT Nur Rahmah
Pokok	32	28	53%	47%
Sambilan	28	32	47%	53%
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa kegiatan usaha responden dari nasabah USP KUD Subur sebagai kegiatan pokok adalah 32 orang (53%) dan tidak beda jauh dengan yang menjadikan kegiatan usaha sebagai pekerjaan sambilan yaitu 28 orang (47%). Jumlah yang berkebalikan terjadi pada pada responden dari nasabah BMT Nur Rahmah, di mana kegiatan usaha responden sebagai kegiatan pokok adalah 28 orang (47%) sedangkan yang menjadikan pekerjaan sambilan yaitu 32 orang (53%).

Kegiatan usaha yang dijalankan sebagai pekerjaan sambilan dikarenakan di Kecamatan Semin mayoritas penduduknya adalah sebagai petani. Petani di Kecamatan Semin adalah petani yang menggarap lahan tadah hujan, jadi mereka lebih memilih untuk memiliki usaha sambilan. Selain menjadi petani, ada pula yang pekerjaan pokok responden adalah PNS, sehingga menjadikan usaha yang ada sebagai pekerjaan sambilan.

#### 6. Karakteristik Responden berdasarkan Alasan Memilih Berwirausaha

Berdasarkan alasan memilih berwirausaha, maka ada empat kelompok alasan berwirausaha. Berikut adalah hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan alasan berwirausaha dari nasabah USP KUD Subur maupun BMT Nur Rahmah.

Tabel 13. Karakteristik Responden berdasarkan Alasan Memilih Berwirausaha

Alasan Berwirausaha	Koperasi		Persentase (%)	
	USP KUD Subur	BMT Nur Rahmah	USP KUD Subur	BMT Nur Rahmah
Inisiatif Sendiri	27	24	45%	40%
Penghasilan Tambahan	21	21	35%	35%
Melanjutkan Usaha Keluarga	11	13	18%	22%
Tidak ada pilihan lain	1	2	2%	3%
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 13 menunjukkan bahwa responden dari nasabah USP KUD Subur sebanyak 27 orang (45%) memilih berwirausaha karena inisiatif sendiri, kemudian responden sebanyak 21 orang (35%) karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan, responden sebanyak 11 orang (18%) memilih berwirausaha karena untuk melanjutkan usaha keluarga, dan selebihnya yaitu 1 orang (2%) memilih berwirausaha karena tidak ada pilihan pekerjaan lain. Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui pula bahwa responden dari nasabah BMT Nur Rahmah bahwa responden sebanyak 24 orang (40%) memilih berwirausaha karena inisiatif sendiri, kemudian responden sebanyak 21 orang (35%) karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan, responden sebanyak 13 orang (22%) memilih berwirausaha karena untuk melanjutkan usaha keluarga, dan selebihnya yaitu 2 orang (3%) memilih berwirausaha karena tidak ada pilihan pekerjaan lain.

Berdasarkan tabel 13, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih berwirausaha karena inisiatif sendiri. Alasan ini berlaku baik pada nasabah USP KUD Subur maupun nasabah BMT Nur Rahmah.

### **C. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji-t dua sampel independen. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji pasyarat. Berikut adalah uji prasyarat dalam penelitian ini.

## 1. Uji Prasyarat Analisis

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Perhitungan uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Teknik untuk uji normalitas ini adalah uji *Kolmogorov- Smirnov*. Apabila nilai signifikansinya lebih dari sama dengan 0,05 maka data berdistribusi normal namun bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal (Ali Muhson, 2012: 21). Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 14. Hasil Uji Normalitas

Koperasi	Variabel	<i>Kolmogoro v- Smirnov</i>	<i>Asymp Sig. (2 tailed)</i>	Ket.
USP KUD Subur	Pengawasan pembiayaan	1,344	0,054	Normal
	Pembinaan UMKM	1,040	0,230	Normal
	Dampak peran pengembangan UMKM	1,118	0,164	Normal
BMT Nur Rahmah	Pengawasan pembiayaan	1,031	0,238	Normal
	Pembinaan UMKM	0,999	0,271	Normal
	Dampak peran pengembangan UMKM	1,328	0,059	Normal

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 14 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang ada dalam peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah berdistribusi normal. Karena ketiganya berdistribusi normal maka uji prasyarat normalitas telah terpenuhi.

### b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian dari kedua kelompok yang diujikan homogen atau tidak. Jika nilai signifikansi pengujian F lebih besar atau sama dengan 0,05 maka varians kedua kelompok homogen, sedangkan jika nilai signifikansi pengujian F ini lebih kecil dari 0,05 maka varians kedua kelompok tidak homogen (Ali Muhson, 2012: 4-5). Hasil uji homogenitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Homogenitas

Variabel	F	Sig.	Keterangan
Pengawasan pembiayaan	3,901	0,051	Homogen
Pembinaan UMKM	0,082	0,776	Homogen
Dampak peran pengembangan UMKM	0,742	0,391	Homogen

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 15 menunjukkan bahwa ketiga variabel yang ada dalam peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah adalah homogen. Hasil analisis uji prasyarat, baik normalitas maupun homogenitas menunjukkan bahwa seluruh uji prasyarat statistik telah terpenuhi, sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan Uji-t untuk menjawab hipotesis penelitian.

## 2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah kedua data memenuhi uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Berikut adalah pengujian hipotesis pada penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan Uji-t.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

H1: Terdapat perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah.

Tabel 16. Analisis Uji-t Peran Pengawasan Pembiayaan

		t	df	Sig. (2-tailed)
<b>Pengawasan pembiayaan</b>	<i>Equal variances assumed</i>	-2,054	118	0,042
	<i>Equal variances not assumed</i>	-2,054	111,519	0,042

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil uji *Independent t-test* pada tabel 16, dapat diketahui data peran pengawasan pembiayaan memiliki varians yang homogen sehingga uji t yang digunakan adalah uji t dengan dasar *Equal variances assumed (pooled t-test)*. Tabel 16 juga menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -2,054 dengan sig.(2-tailed) 0,042. Karena nilai  $\text{sig.} < 0,05$  ( $0,042 < 0,05$ ) berarti hipotesis pertama diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peran pengawasan pembiayaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah.

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan Uji *Independent t-test* dalam penelitian ini dapat pula digunakan untuk mengetahui koperasi manakah yang lebih baik dalam memberikan peran pengawasan pembiayaan terhadap UMKM penerima pembiayaan. Berdasarkan hasil Uji *Independent t-test* (lampiran 9), nilai rata-rata peran pengawasan pembiayaan terhadap UMKM penerima pembiayaan

oleh BMT Nur Rahmah lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan pembiayaan terhadap UMKM penerima pembiayaan oleh BMT Nur Rahmah lebih baik daripada peran pengawasan pembiayaan terhadap UMKM penerima pembiayaan oleh USP KUD Subur.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

H2: Terdapat perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah.

Tabel 17. Analisis Uji-t Peran Pembinaan UMKM

		t	df	Sig. (2-tailed)
<b>Pembinaan UMKM</b>	<i>Equal variances assumed</i>	-1,517	118	0,132
	<i>Equal variances not assumed</i>	-1,517	117,473	0,132

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil uji *Independent t-test* pada tabel 17, dapat diketahui data pembinaan UMKM memiliki varians yang sama atau homogen sehingga uji t yang digunakan adalah uji t dengan dasar *Equal variances assumed (pooled t-test)*. Tabel 17 juga menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,517 dengan sig.(2-tailed) 0,132. Karena nilai sig.  $> 0,05$  ( $0,132 > 0,05$ ) berarti hipotesis kedua ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah.

Berdasarkan hasil Uji *Independent t-test* (lampiran 10), nilai rata-rata peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan oleh

BMT Nur Rahmah lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan oleh BMT Nur Rahmah lebih baik daripada peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan oleh USP KUD Subur.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

H3: Terdapat perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen.

Tabel 18. Analisis Uji-t Dampak Peran Pengembangan UMKM

		<b>t</b>	<b>df</b>	<b>Sig. (2-tailed)</b>
<b>Dampak Peran Pengembangan UMKM</b>	<i>Equal variances assumed</i>	-1,532	118	0,128
	<i>Equal variances not assumed</i>	-1,532	117,206	0,128

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil uji *Independent t-test* pada tabel 18, dapat diketahui data dampak peran pengembangan UMKM memiliki varians yang sama atau homogen sehingga uji t yang digunakan adalah uji t dengan dasar *Equal variances assumed (pooled t-test)*. Tabel 18 juga menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1,532 dengan sig.(2-tailed) 0,128. Karena nilai sig. > 0,05 (0,128 > 0,05) berarti hipotesis ketiga ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen.

Berdasarkan hasil Uji *Independent t-test* (lampiran 11), nilai rata-rata dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM oleh BMT Nur Rahmah lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM oleh BMT Nur Rahmah lebih baik USP KUD Subur.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Terdapat Perbedaan Peran Pengawasan terhadap UMKM Penerima Pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah**

Hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah” didukung oleh hasil penelitian yang empiris. Sesuai hasil uji *independent t-test* yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah. Berdasarkan hasil uji *independent t-test* pula, BMT Nur Rahmah lebih baik daripada USP KUD Subur dalam berperan mengawasi UMKM penerima pembiayaan.

Adanya perbedaan pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan dari USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah terletak pada frekuensi kunjungan BMT Nur Rahmah yang lebih sering daripada USP KUD Subur. Perbedaan frekuensi ini terjadi karena BMT Nur Rahmah melakukan penagihan dengan sistem jemput bola. Penagihan dengan

jemput bola dilakukan secara rutin pada setiap hari *pasaran* tertentu sehingga lebih rutin mengunjungi. Berbeda dengan USP KUD Subur yang melakukan pengawasan dengan kunjungan sekali pada sebulan setelah pembiayaan diberikan dan tiga bulan kemudian para pelaku usaha diminta untuk melaporkan perkembangan usahanya ke USP KUD Subur untuk dilakukan pemantauan. Pantauan juga dilakukan ketika anggota yang bersangkutan melakukan angsuran ke kantor dengan cara tanya jawab.

Perbedaan pengawasan yang dilaksanakan terkait dengan sumber daya manusia pada masing-masing koperasi. Sumber daya manusia di USP KUD Subur terbagi dengan pelayanan selain kegiatan simpan- pinjam. Berbeda dengan BMT Nur Rahmah yang sumber daya manusianya memang khusus mengurus kegiatan simpan- pinjam termasuk jemput bola.

## **2. Terdapat Perbedaan Peran Pembinaan terhadap UMKM Penerima Pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah**

Hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah” tidak didukung oleh hasil penelitian yang empiris. Sesuai hasil uji *independent t-test* yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah. Berdasarkan hasil uji *independent t-test* pula, BMT Nur Rahmah lebih baik daripada USP KUD Subur dalam membina UMKM yang menerima pembiayaan.

Penerima pembiayaan dari USP KUD Subur yang mendapatkan pembinaan adalah yang memiliki usaha dengan basis kerajinan. Pembinaan dilakukan hanya pada awal saat diberikan pembiayaan dengan mendatangkan pelatih dari perguruan tinggi. Tidak jauh berbeda dengan frekuensi pembinaan yang dilakukan pihak BMT Nur Rahmah terhadap UMKM yang menerima pembiayaannya. UMKM yang menerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah dibina dengan cara pelatihan dan seminar. Akan tetapi pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara rutin. BMT yang dinyatakan lebih proaktif dalam peran pembinaan ternyata belum dapat menunjukkannya pada pembinaan UMKM di Kecamatan Semin.

### **3. Terdapat Perbedaan Dampak Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam Pengembangan UMKM Dilihat dari Segi Omset, Laba, dan Jumlah Konsumen**

Hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen” tidak didukung oleh hasil penelitian yang empiris. Sesuai hasil uji *independent t-test* yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen.

Adanya pembiayaan dari USP KUD Subur maupun BMT Nur Rahmah terhadap UMKM di Kecamatan Semin sama- sama memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM dilihat dari omset, laba, dan jumlah konsumen setelah menerima pembiayaan baik dari USP KUD Subur ataupun BMT Nur Rahmah. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel 19. Perubahan Omset, Laba, dan Jumlah Konsumen pada Bidang Usaha yang menerima Pembiayaan dari USP KUD Subur

Bentuk Usaha	Omset		Laba		Jumlah Konsumen		Jumlah Tiap Bidang Usaha
	Naik	Turunan	Naik	Turunan	Naik	Turunan	
Usaha Dagang	13	6	14	5	14	5	19
Usaha Makanan	10	1	8	3	9	2	11
Usaha Jasa	8	4	8	4	9	3	12
Kerajinan	13	1	13	1	11	3	14
Ternak	4	0	4	0	3	1	4

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 20. Perubahan Omset, Laba, dan Jumlah Konsumen pada Bidang Usaha yang menerima Pembiayaan dari BMT Nur Rahmah

Bentuk Usaha	Omset		Laba		Jumlah Konsumen		Jumlah Tiap Bidang Usaha
	Naik	Turunan	Naik	Turunan	Naik	Turunan	
Usaha Dagang	18	0	18	0	11	7	18
Usaha Makanan	21	0	21	0	9	12	21
Usaha Jasa	9	0	8	1	6	3	9
Kerajinan	1	0	1	0	1	0	1
Ternak	11	0	11	0	7	4	11

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 19, usaha yang paling banyak menerima pembiayaan adalah kelompok usaha dagang sebanyak 19 dan kerajinan sebanyak 14. Dua bidang usaha terbanyak ini pulalah yang lebih dari 50% pengusahanya mengalami kenaikan omset, laba, dan jumlah konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari USP KUD Subur lebih efektif pada bidang usaha dagang dan kerajinan.

Berdasarkan tabel 20, usaha yang paling banyak menerima pembiayaan adalah usaha makanan dan usaha dagang. Pada bidang usaha dagang omset, laba, dan jumlah konsumen mengalami kenaikan setelah menerima pembiayaan. Usaha makanan juga mengalami kenaikan omset dan laba, namun jumlah konsumen tidak mampu naik seiring terjadinya kenaikan omset dan laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa pembiayaan dari BMT Nur Rahmah lebih efektif pada bidang usaha dagang.

Tabel 19 dan tabel 20 merupakan tabel untuk mengetahui perubahan omset, laba, dan jumlah konsumen pada setiap bidang yang mendapat pembiayaan baik dari USP KUD Subur maupun BMT Nur Rahmah. Berikut ini merupakan tabel untuk melihat secara keseluruhan berapa banyak usaha yang mengalami perubahan omset, laba, dan jumlah konsumen.

Tabel 21. Banyak usaha yang mengalami perubahan omset, laba, dan jumlah konsumen secara keseluruhan dari nasabah USP KUD Subur

		<b>Banyaknya Usaha</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Omset</b>	Naik	48	80 %
	Turun	12	20 %
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100 %</b>
<b>Laba</b>	Naik	47	78,33 %
	Turun	13	21,66 %
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100 %</b>
<b>Jumlah Konsumen</b>	Naik	46	76,66 %
	Turun	14	23,33 %
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 22. Banyak usaha yang mengalami perubahan omset, laba, dan jumlah konsumen secara keseluruhan dari nasabah BMT Nur Rahmah

		<b>Banyaknya Usaha</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Omset</b>	Naik	60	100 %
	Turun	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100 %</b>
<b>Laba</b>	Naik	59	98,33 %
	Turun	1	1,66 %
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100 %</b>
<b>Jumlah Konsumen</b>	Naik	33	55 %
	Turun	27	45 %
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 21 sebanyak 48 (80%) usaha mengalami kenaikan omset setelah menerima pembiayaan dari USP KUD Subur, sebanyak 47 (78,33%) usaha mengalami kenaikan laba setelah menerima pembiayaan dari USP KUD Subur, dan sebanyak 46 (76,66%) usaha mengalami kenaikan jumlah konsumen setelah menerima pembiayaan dari USP KUD

Subur. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% usaha yang menerima pembiayaan dari USP KUD Subur mengalami kenaikan omset, laba, dan jumlah konsumen.

Berdasarkan tabel 22 sebanyak 60 (100%) usaha mengalami kenaikan omset setelah menerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah, sebanyak 59 (98,33%) usaha mengalami kenaikan laba setelah menerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah, dan sebanyak 33 (55%) usaha mengalami kenaikan jumlah konsumen setelah menerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% usaha yang menerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah mengalami kenaikan omset, laba, dan jumlah konsumen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan uji *Independent t-test* yang menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar -2,054 dengan sig.(2-tailed) 0,042 ( $0,042 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan di BMT Nur Rahmah lebih sering melakukan pengawasan terhadap penerima pembiayaan.
2. Tidak terdapat perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan uji *Independent t-test* yang menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 1,517 dengan sig.(2-tailed) 0,132 ( $0,132 > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa di USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah sama- sama melakukan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan.
3. Tidak terdapat perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan uji *Independent t-test* yang menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar -1,532 dengan sig.(2-tailed) 0,128 ( $0,128 > 0,05$ ). Sebanyak 48 (80%) usaha

mengalami kenaikan omset setelah menerima pembiayaan dari USP KUD Subur, sebanyak 47 (78,33%) usaha mengalami kenaikan laba setelah menerima pembiayaan dari USP KUD Subur, dan sebanyak 46 (76,66%) usaha mengalami kenaikan jumlah konsumen setelah menerima pembiayaan dari USP KUD Subur. Sementara itu nasabah BMT Nur Rahmah sebanyak 60 (100%) usaha mengalami kenaikan omset setelah menerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah, sebanyak 59 (98,33%) usaha mengalami kenaikan laba setelah menerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah, dan sebanyak 33 (55%) usaha mengalami kenaikan jumlah konsumen setelah menerima pembiayaan dari BMT Nur Rahmah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian seperti tersebut di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan peran pengawasan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah. Perbedaan pengawasan yang diberikan dari USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah akan lebih baik jika keduanya menggabungkan sistem pengawasan yang telah dilaksanakan. Pengawasan yang sekiranya lebih baik dan dapat meminimalisir penyalahgunaan pembiayaan dapat diterapkan dan digunakan bersama, selain itu frekuensi pengawasan terhadap pembiayaan pada USP KUD lebih ditingkatkan.
2. Tidak terdapat perbedaan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan antara USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah. USP KUD

Subur ataupun BMT Nur Rahmah yang telah melakukan peran pembinaan terhadap UMKM penerima pembiayaan hendaknya dapat melakukan pembinaan di seluruh jenis usaha agar tidak terjadi kecenderungan pada jenis usaha tertentu saja yang dibina.

3. Tidak terdapat perbedaan dampak peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM dilihat dari segi omset, laba, dan jumlah konsumen. Diharapkan dengan adanya bantuan pembiayaan dari USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah terhadap UMKM di Kecamatan Semin terus dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Adanya kenaikan omset, laba, dan jumlah konsumen diharapkan menjadi angin segar bagi pihak koperasi dan UMKM agar tetap dapat menjalin kerjasama dan saling bergantung.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa hal yang menurut peneliti menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan terbatas pada informasi yang sebagian besar didapat dari responden, sehingga dalam menyimpulkan hasil penelitian harus dilakukan dengan hati-hati.
2. Penelitian masih dalam kajian yang umum. Peneliti belum melakukan kajian lebih rinci dan mendalam mengenai peran koperasi dalam pengembangan UMKM.
3. Karena pada awalnya data penerima pembiayaan belum dikelompokkan berdasar besar pembiayaan dan jenis usaha maka responden yang diambil

hanya dibatasi dengan kuota sehingga dirasa belum semua jenis usaha yang ada di Kecamatan Semin dapat terwakili.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2000. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Ananda, Fitra. 2011. Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti. 1992. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arthesa, Ade. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- Baswir, Revrisond. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- BPS Kabupaten Gunungkidul. 2015. *Kecamatan Semin dalam Angka*. Diambil dari [http://gunungkidulkab.bps.go.id/websitegunkid/pdf\\_publicasi/Kecamatan-Semin-Dalam-Angka-2015.pdf](http://gunungkidulkab.bps.go.id/websitegunkid/pdf_publicasi/Kecamatan-Semin-Dalam-Angka-2015.pdf) pada 7 Juni 2016 jam 16.18
- \_\_\_\_\_. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Semin*. Diambil dari [http://gunungkidulkab.bps.go.id/websitegunkid/pdf\\_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Semin-2015.pdf](http://gunungkidulkab.bps.go.id/websitegunkid/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Semin-2015.pdf) pada 28 Maret 2016 jam 14.24.
- BPS Yogyakarta. 2015. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*. Diambil dari [http://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam-Angka-2015.pdf](http://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam-Angka-2015.pdf) pada 27 Juni 2016 jam 21.15.
- Chaniago, Arifinial. 1984. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, H. Malayu. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hudiyanto. 2002. *Sistem Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*. Yogyakarta: UII Pres.

- Itep. 2002. *Mekanisme Pemberian Modal Kredit dan BMT kepada Pengusaha Kecil*. Bandung: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kelurahan Bendung. 2015. *Data Monografi Tahun 2015 Desa Bendung Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Bulurejo. 2015. *Buku Monografi Tahun 2015 Desa Bulurejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Candirejo. 2015. *Data Monografi Tahun 2015 Desa Candirejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Kalitekuk. 2015. *Buku Monografi Tahun 2015 Desa Kalitekuk Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Karang Sari. 2015. *Buku Monografi Tahun 2015 Desa Karang Sari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Kemejing. 2015. *Buku Monografi Tahun 2015 Desa Kemejing Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Pundungsari. 2015. *Buku Monografi Tahun 2015 Desa Pundungsari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Rejosari. 2015. *Buku Monografi Tahun 2015 Desa Rejosari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Semin. 2015. *Buku Monografi Tahun 2015 Desa Semin Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kelurahan Sumberejo. 2015. *Buku Monografi Tahun 2015 Desa Sumberejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul*.
- Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah. Diambil dari <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/> pada 10 Februari 2016 jam 11.25
- Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2012. *Laporan Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro dan Kajian Situasi Terkini Usaha Mikro di Papua Barat*. Diambil dari [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_342544.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_342544.pdf) pada 8 Agustus 2016 jam 11.43.

- Muhson, Ali. 2012. Materi Pelatihan Analisis Statistik dengan SPSS. *Modul pelatihan*. Yogyakarta: FE UNY
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Partomo, Tiktik Sartika. 2004. Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Working Paper Series*. Nomor 09 halaman 5. Fakultas Ekonomi Trisakti.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri BUMN No.5/ MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 2008 tentang UMKM.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Siagian, Sondang.P. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siregar, Indah Komala Sari. 2013. Studi Komparatif Peran Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama dan BMT Insani dalam Pengembangan UMK di Kota Padangsidimpuan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Situmorang, Victor.M. dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soleh, Mohamad. 2008. Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus : UKM Manufaktur di Kota Semarang). *Tesis*. Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Subyakto, Harsoyono dan Bambang Tri Cahyono. 1983. *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing.

Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.

Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Utami, Fika Tri. 2014. Studi Perbandingan Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah di BMT Bina Umat Sejahtera dan KSP Mitra Tani Mandiri Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. *Skripsi*. Twinning Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Walgito, Bimo. 1997. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 1988. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori- Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

<http://indonesiaindonesia.com/f/8667-peran-lembaga-keuangan-mikro/> diakses pada 10 Februari 2016 jam 10.21

<http://www.depkop.go.id> tentang Pedoman Standar Operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam diakses pada 8 Agustus 2016 jam 09.27

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

# LAMPIRAN

*Lampiran 1. Lembar Penilaian Angket*

**LEMBAR PENILAIAN**  
**ANGKET PERAN USP KUD SUBUR DAN BMT NUR RAHMAH**  
**DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN SEMIN**

**Judul Penelitian** : **STUDI KOMPARASI PERAN USP KUD SUBUR DAN BMT NUR RAHMAH DALAM PENGEMBANGAN UMM DI KECAMATAN SEMIN**

**Sasaran Penelitian** : **1. Nasabah USP KUD Subur selaku Pelaku UMKM**  
**2. Nasabah BMT Nur Rahmah selaku Pelaku UMKM**

**Peneliti** : **Retno Parwati**

**Petunjuk** :

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak selaku evaluator instrumen kuesioner peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM. Pendapat, kritik, saran, penilaian, dan komentar Bapak akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas instrumen peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon Bapak memberikan pendapat pada setiap pernyataan dalam lembar evaluasi ini.

**A. Angket Peran USP KUD Subur dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Semin**

No.	Indikator	No. Butir	Butir Pernyataan
1.	Peran pengawasan pembiayaan	1.	USP KUD Subur meneliti terlebih dahulu kegiatan yang akan diberikan pembiayaan
		2.	Pengawasan dari USP KUD Subur dilakukan sejak pengajuan prosedur pembiayaan
		3.	USP KUD Subur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan secara langsung
		4.	USP KUD Subur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan berkunjung secara berkala
		5.	USP KUD Subur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan cara kunjungan mendadak
		6.	Saya melakukan laporan rutin ke USP KUD Subur guna memudahkan pengawasan

		7.	Saya merasa keberatan dengan pengawasan kegiatan pembiayaan ini
2.	Peran pembinaan terhadap UMKM	8.	Pembiayaan yang diberikan USP KUD Subur disertai pembinaan usaha
		9.	USP KUD Subur melakukan bimbingan bidang produksi sebagai bentuk pembinaan
		10.	USP KUD Subur melakukan bimbingan cara memproduksi barang sebagai bentuk pembinaan
		11.	USP KUD Subur melakukan bimbingan jaringan pemasaran sebagai bentuk pembinaan
		12.	Bimbingan dari USP KUD Subur dilakukan secara berkala
		13.	Bimbingan dari USP KUD Subur secara berkelompok
		14.	USP KUD Subur memberikan pelatihan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan pengembangan UMKM
		15.	Pelatihan usaha dilakukan hanya pada kelompok usaha tertentu saja
		16.	USP KUD Subur bekerjasama dengan pihak luar USP KUD Subur dalam program pelatihan usaha
3.	Pengembangan UMKM	17.	Bantuan pengembangan UMKM dari USP KUD Subur menyebabkan omset penjualan saya meningkat
		18.	Omset penjualan yang meningkat terjadi karena variasi barang dalam UMKM saya bertambah
		19.	Bantuan pengembangan UMKM dari USP KUD Subur menyebabkan laba pada UMKM saya meningkat
		20.	Laba usaha pada UMKM tidak saya gunakan untuk mengembangkan usaha
		21.	Bantuan pengembangan UMKM dari USP KUD Subur menyebabkan jumlah konsumen pada UMKM saya meningkat
		22.	Jumlah konsumen yang meningkat pada UMKM tidak menyebabkan laba juga meningkat

**B. Angket Peran USP KUD Subur dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Semin**

No.	Indikator	No. Butir	Butir Pernyataan
1.	Peran pengawasan pembiayaan	1.	BMT Nur Rahmah meneliti terlebih dahulu kegiatan yang akan diberikan pembiayaan
		2.	Pengawasan dari BMT Nur Rahmah dilakukan sejak pengajuan prosedur pembiayaan
		3.	BMT Nur Rahmah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan secara langsung
		4.	BMT Nur Rahmah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan berkunjung secara berkala
		5.	BMT Nur Rahmah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan cara kunjungan mendadak
		6.	Saya melakukan laporan rutin ke BMT Nur Rahmah guna memudahkan pengawasan
		7.	Saya merasa keberatan dengan pengawasan kegiatan pembiayaan ini
2.	Peran pembinaan terhadap UMKM	8.	Pembiayaan yang diberikan BMT Nur Rahmah disertai pembinaan usaha
		9.	BMT Nur Rahmah melakukan bimbingan bidang produksi sebagai bentuk pembinaan
		10.	BMT Nur Rahmah melakukan bimbingan cara memproduksi barang sebagai bentuk pembinaan
		11.	BMT Nur Rahmah melakukan bimbingan jaringan pemasaran sebagai bentuk pembinaan
		12.	Bimbingan dari BMT Nur Rahmah dilakukan secara berkala
		13.	Bimbingan dari BMT Nur Rahmah secara berkelompok
		14.	BMT Nur Rahmah memberikan pelatihan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan pengembangan UMKM
		15.	Pelatihan usaha dilakukan hanya pada kelompok usaha tertentu saja
		16.	BMT Nur Rahmah bekerjasama dengan pihak luar BMT dalam program pelatihan usaha
3.	Pengembangan UMKM	17.	Bantuan pengembangan UMKM dari BMT Nur Rahmah menyebabkan omset penjualan saya meningkat
		18.	Omset penjualan yang meningkat terjadi karena variasi barang dalam UMKM saya bertambah

		19.	Bantuan pengembangan UMKM dari BMT Nur Rahmah menyebabkan laba pada UMKM saya meningkat
		20.	Laba usaha pada UMKM tidak saya gunakan untuk mengembangkan usaha
		21.	Bantuan pengembangan UMKM dari BMT Nur Rahmah menyebabkan jumlah konsumen pada UMKM saya meningkat
		22.	Jumlah konsumen yang meningkat pada UMKM tidak menyebabkan laba juga meningkat

**C. Kebenaran Instrumen Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam Pengembangan UMKM**

**Petunjuk:**

1. Apabila terjadi kesalahan instrumen pada aspek materi, mohon dituliskan pada kolom 2, pada bagian mana kesalahan tersebut terjadi.
2. Pada kolom 3: ditulis jenis kesalahan, misalnya kesalahan kisi-kisi, konsep, kalimat, atau lainnya.
3. Pada kolom 4: saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas.

No.	Bagian yang salah	Jenis kesalahan	Saran perbaikan
1.	2	3	4

**D. Komentar dan saran secara umum**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**E. Kesimpulan**

Instrumen ini dinyatakan:

1. Layak digunakan untuk uji coba lapangan tanpa revisi
2. Layak digunakan untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran (Lingkari salah satu Option kelayakan tersebut)

Yogyakarta, Juni 2016  
Evaluator

Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd.  
NIP. 19500906 197412 1 001

*Lampiran 2. Angket penelitian untuk UMKM Nasabah USP KUD Subur*

**ANGKET PENELITIAN**  
**STUDI KOMPARASI PERAN USP KUD SUBUR**  
**DAN BMT NUR RAHMAH**  
**DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN SEMIN**  
**(Untuk UMKM Nasabah USP KUD Subur)**

Kepada Yth.

Bapak / Ibu / Sdr/i Nasabah

USP KUD Subur

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi pada program Strata (S1) Universitas Negeri Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Parwati

NIM : 12804241003

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Pendidikan Ekonomi

Memohon bantuan Bapak / Ibu / Sdr/i nasabah USP KUD Subur untuk mengisi lembar angket ini sesuai dengan keadaan Bapak / Ibu / Sdr/i. Penelitian ini bersifat akademis, sehingga kerahasiaannya terjaga.

Atas kerjasama Bapak / Ibu / Sdr/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Peneliti

Retno Parwati

**Petunjuk:**

1. Bacalah setiap pernyataan yang ada dengan seksama.
2. Isilah data diri Anda pada bagian Keadaan Umum Responden.

**Keadaan Umum Responden**

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Status perkawinan :
6. Jenis usaha :
7. Tempat usaha :
8. Kegiatan UMKM nasabah adalah sebagai:
  - a. Pekerjaan pokok
  - b. Pekerjaan sambilan
9. Alasan menjadi wirausahawan:
  - a. Inisiatif sendiri
  - b. Sebagai penghasilan tambahan
  - c. Melanjutkan usaha keluarga
  - d. Tidak ada pilihan pekerjaan lain
10. Jumlah pembiayaan yang diterima saat ini: Rp \_\_\_\_\_

Setelah selesai mengisi data diri Anda, selanjutnya isilah angket berikut ini mengenai peran USP KUD Subur dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Semin. Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan pada pernyataan-pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi Anda.

**Keterangan untuk pilihan jawaban:**

- SS = Sangat setuju  
 S = Setuju  
 TS = Tidak setuju  
 STS = Sangat tidak setuju

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
	Menurut persepsi Anda:				
<b>A.</b>	<b>Pengawasan pembiayaan</b>				
1.	USP KUD Subur meneliti terlebih dahulu kegiatan yang akan diberikan pembiayaan				
2.	Pengawasan dari USP KUD Subur dilakukan sejak pengajuan prosedur pembiayaan				
3.	USP KUD Subur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan secara langsung				
4.	USP KUD Subur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan berkunjung secara berkala				
5.	USP KUD Subur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan cara kunjungan mendadak				
6.	Saya melakukan laporan rutin ke USP KUD Subur guna memudahkan pengawasan				
7.	Saya merasa keberatan dengan pengawasan kegiatan pembiayaan ini				
<b>B.</b>	<b>Pembinaan terhadap UMKM</b>				
8.	Pembiayaan yang diberikan USP KUD Subur disertai pembinaan usaha				
9.	USP KUD Subur melakukan bimbingan bidang produksi sebagai bentuk pembinaan				
10.	USP KUD Subur melakukan bimbingan cara memproduksi barang sebagai bentuk pembinaan				
11.	USP KUD Subur melakukan bimbingan jaringan pemasaran sebagai bentuk pembinaan				
12.	Bimbingan dari USP KUD Subur dilakukan secara berkala				

13.	Bimbingan dari USP KUD Subur secara berkelompok				
14.	USP KUD Subur memberikan pelatihan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan pengembangan UMKM				
15.	Pelatihan usaha dilakukan hanya pada kelompok usaha tertentu saja				
16.	USP KUD Subur bekerjasama dengan pihak luar USP KUD Subur dalam program pelatihan usaha				
<b>C.</b>	<b>Pengembangan UMKM</b>				
17.	Bantuan pengembangan UMKM dari USP KUD Subur menyebabkan omset penjualan saya meningkat				
18.	Omset penjualan yang meningkat terjadi karena variasi barang dalam UMKM saya bertambah				
19.	Bantuan pengembangan UMKM dari USP KUD Subur menyebabkan laba pada UMKM saya meningkat				
20.	Laba usaha pada UMKM tidak saya gunakan untuk mengembangkan usaha				
21.	Bantuan pengembangan UMKM dari USP KUD Subur menyebabkan jumlah konsumen pada UMKM saya meningkat				
22.	Jumlah konsumen yang meningkat pada UMKM tidak menyebabkan laba juga meningkat				

*Lampiran 3. Angket penelitian untuk UMKM Nasabah BMT Nur Rahmah*

**ANGKET PENELITIAN**  
**STUDI KOMPARASI PERAN USP KUD SUBUR**  
**DAN BMT NUR RAHMAH**  
**DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN SEMIN**  
**(Untuk UMKM Nasabah BMT Nur Rahmah)**

Kepada Yth.

Bapak / Ibu / Sdr/i Nasabah

BMT Nur Rahmah

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir Skripsi pada program Strata (S1) Universitas Negeri Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Parwati

NIM : 12804241003

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Pendidikan Ekonomi

Memohon bantuan Bapak / Ibu / Sdr/i nasabah BMT Nur Rahmah untuk mengisi lembar angket ini sesuai dengan keadaan Bapak / Ibu / Sdr/i. Penelitian ini bersifat akademis, sehingga kerahasiaannya terjaga.

Atas kerjasama Bapak / Ibu / Sdr/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Peneliti

Retno Parwati

**Petunjuk:**

1. Bacalah setiap pernyataan yang ada dengan seksama.
2. Isilah data diri Anda pada bagian Keadaan Umum Responden.

**Keadaan Umum Responden**

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Status perkawinan :
6. Jenis usaha :
7. Tempat usaha :
8. Kegiatan UMKM nasabah adalah sebagai:
  - a. Pekerjaan pokok
  - b. Pekerjaan sambilan
9. Alasan menjadi wirausahawan:
  - a. Inisiatif sendiri
  - b. Sebagai penghasilan tambahan
  - c. Melanjutkan usaha keluarga
  - d. Tidak ada pilihan pekerjaan lain
10. Jumlah pembiayaan yang diterima saat ini: Rp \_\_\_\_\_

Setelah selesai mengisi data diri Anda, selanjutnya isilah angket berikut ini mengenai peran BMT Nur Rahmah dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Semin. Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan pada pernyataan-pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi Anda.

**Keterangan untuk pilihan jawaban:**

- SS = Sangat setuju  
 S = Setuju  
 TS = Tidak setuju  
 STS = Sangat tidak setuju

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
	Menurut persepsi Anda:				
<b>A.</b>	<b>Pengawasan pembiayaan</b>				
1.	BMT Nur Rahmah meneliti terlebih dahulu kegiatan yang akan diberikan pembiayaan				
2.	Pengawasan dari BMT Nur Rahmah dilakukan sejak pengajuan prosedur pembiayaan				
3.	BMT Nur Rahmah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan secara langsung				
4.	BMT Nur Rahmah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan berkunjung secara berkala				
5.	BMT Nur Rahmah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dengan cara kunjungan mendadak				
6.	Saya melakukan laporan rutin ke BMT Nur Rahmah guna memudahkan pengawasan				
7.	Saya merasa keberatan dengan pengawasan kegiatan pembiayaan ini				
<b>B.</b>	<b>Pembinaan terhadap UMKM</b>				
8.	Pembiayaan yang diberikan BMT Nur Rahmah disertai pembinaan usaha				
9.	BMT Nur Rahmah melakukan bimbingan bidang produksi sebagai bentuk pembinaan				
10.	BMT Nur Rahmah melakukan bimbingan cara memproduksi barang sebagai bentuk pembinaan				
11.	BMT Nur Rahmah melakukan bimbingan jaringan pemasaran sebagai bentuk pembinaan				
12.	Bimbingan dari BMT Nur Rahmah dilakukan secara berkala				
13.	Bimbingan dari BMT Nur Rahmah secara berkelompok				

14.	BMT Nur Rahmah memberikan pelatihan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan pengembangan UMKM				
15.	Pelatihan usaha dilakukan hanya pada kelompok usaha tertentu saja				
16.	BMT Nur Rahmah bekerjasama dengan pihak luar BMT dalam program pelatihan usaha				
<b>C.</b>	<b>Pengembangan UMKM</b>				
17.	Bantuan pengembangan UMKM dari BMT Nur Rahmah menyebabkan omset penjualan saya meningkat				
18.	Omset penjualan yang meningkat terjadi karena variasi barang dalam UMKM saya bertambah				
19.	Bantuan pengembangan UMKM dari BMT Nur Rahmah menyebabkan laba pada UMKM saya meningkat				
20.	Laba usaha pada UMKM tidak saya gunakan untuk mengembangkan usaha				
21.	Bantuan pengembangan UMKM dari BMT Nur Rahmah menyebabkan jumlah konsumen pada UMKM saya meningkat				
22.	Jumlah konsumen yang meningkat pada UMKM tidak menyebabkan laba juga meningkat				

*Lampiran 4. Data Keadaan Umum Responden USP KUD Subur*

No.	Keadaan Umum Responden					
	2	3	4	6	8	9
1	30	P	S1	Foto Kopi	Pokok	Inisiatif Sendiri
2	46	L	SMA	Dagang Kayu	Pokok	Inisiatif Sendiri
3	26	L	SMP	Pembuat Tahu	Pokok	Inisiatif Sendiri
4	39	L	SMA	BTL PLN	Sambilan	Penghasilan Tambahan
5	54	L	SMK	Kel. Tani	Sambilan	Inisiatif Sendiri
6	37	L	SMA	BTL PLN	Sambilan	Inisiatif Sendiri
7	40	L	SMK	BTL PLN	Sambilan	Penghasilan Tambahan
8	46	L	SMA	Toko Material	Sambilan	Penghasilan Tambahan
9	49	L	SMK	Kerajinan Batu Alam	Pokok	Inisiatif Sendiri
10	53	L	SMP	Kel. Tani	Sambilan	Penghasilan Tambahan
11	51	L	SMA	Ternak Ayam	Sambilan	Inisiatif Sendiri
12	53	L	SMP	Ternak Kambing	Sambilan	Inisiatif Sendiri
13	60	L	SMA	Kerajinan Batu Alam	Pokok	Inisiatif Sendiri
14	57	L	SMP	Kerajinan Batu Alam	Pokok	Inisiatif Sendiri
15	56	L	SMP	Bengkel Sepeda	Sambilan	Penghasilan Tambahan
16	60	L	SMA	Kerajinan Batu Alam	Sambilan	Penghasilan Tambahan
17	51	L	SMP	Dagang Jamu	Sambilan	Penghasilan Tambahan
18	57	L	SMA	Bengkel	Sambilan	Penghasilan Tambahan
19	51	L	SMA	Kerajinan Batu Alam	Pokok	Inisiatif Sendiri
20	56	L	SMA	Dagang Daging Sapi	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
21	52	L	SMA	Kerajinan Tanah Liat	Pokok	Inisiatif Sendiri
22	54	L	SMA	Kerajinan Kayu	Pokok	Inisiatif Sendiri
23	59	L	SMA	Pengrajin Makanan	Sambilan	Penghasilan Tambahan
24	58	L	SMP	Dagang Ayam Potong	Pokok	Inisiatif Sendiri
25	59	L	SMA	Foto Kopi	Sambilan	Penghasilan Tambahan
26	42	P	SMA	Percetakan	Sambilan	Penghasilan Tambahan
27	54	L	SMA	Kerajinan Batu Alam	Pokok	Inisiatif Sendiri
28	43	L	SMA	Ternak Ayam	Pokok	Inisiatif Sendiri
29	50	L	SMP	Kerajinan Bambu	Pokok	Inisiatif Sendiri
30	58	L	SMP	Pembuat Pupuk Organik	Sambilan	Inisiatif Sendiri
31	59	L	SMP	Dagang Mi Ayam	Pokok	Inisiatif Sendiri
32	45	L	SMA	Warung Kelontong	Pokok	Inisiatif Sendiri
33	47	P	SMA	Pembuat Tahu	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
34	45	L	SMP	Toko Material	Pokok	Tidak Ada Pilihan Lain
35	50	L	SMP	Pembuat Tahu	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
36	52	L	SMA	Dagang Mi Ayam	Sambilan	Penghasilan Tambahan
37	40	L	SMA	Pembuat Wayang	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga

38	60	L	D3	Mebel	Sambilan	Penghasilan Tambahan
39	37	P	SMA	Katering	Pokok	Inisiatif Sendiri
40	63	L	SMA	Kerajinan Batu Alam	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
41	48	P	SMP	Pembuat Tempe	Pokok	Penghasilan Tambahan
42	52	P	SMP	Dagang Ayam Potong	Sambilan	Inisiatif Sendiri
43	56	L	SMP	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
44	57	P	SMA	Penjahit	Sambilan	Penghasilan Tambahan
45	64	L	D3	Foto Kopi	Sambilan	Inisiatif Sendiri
46	61	L	SMP	Bengkel	Sambilan	Penghasilan Tambahan
47	47	P	SMA	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
48	60	L	SMP	Mebel	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
49	51	P	SMP	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
50	59	P	SMP	Warung Kelontong	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
51	58	L	SMP	Dagang Alat Pertanian	Sambilan	Penghasilan Tambahan
52	39	P	SMA	Warung Makan	Pokok	Inisiatif Sendiri
53	52	L	SMA	Toko Material	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
54	57	L	SMA	Dagang Alat Pertanian	Pokok	Inisiatif Sendiri
55	40	P	SMA	Pembuat Tahu	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
56	46	L	SMA	Warung Kelontong	Sambilan	Inisiatif Sendiri
57	44	P	SMP	Dagang Daging Ayam	Pokok	Inisiatif Sendiri
58	56	L	SMP	Bengkel	Sambilan	Penghasilan Tambahan
59	50	L	SMA	Ternak Ayam	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
60	49	L	SMA	Kerajinan Tanah Liat	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga

Lampiran 5. Data Keadaan Umum Responden BMT Nur Rahmah

No.	Keadaan Umum Responden					
	2	3	4	6	8	9
1	40	P	SMP	Dagang Ikan	Sambilan	Penghasilan Tambahan
2	58	L	SMA	Giling Padi	Pokok	Inisiatif Sendiri
3	38	L	SMP	Penjahit	Pokok	Inisiatif Sendiri
4	60	L	SD	Barang Bekas	Sambilan	Inisiatif Sendiri
5	50	P	SD	Dagang Sayur	Pokok	Inisiatif Sendiri
6	45	P	SMP	Dagang Pakaian	Pokok	Inisiatif Sendiri
7	45	P	SD	Dagang Sayur	Pokok	Inisiatif Sendiri
8	45	P	SD	Dagang Sayur	Pokok	Inisiatif Sendiri
9	26	P	SMK	Dagang Mi Ayam	Sambilan	Melanjutkan Usaha Keluarga
10	52	P	SMA	Dagang Sandal	Pokok	Inisiatif Sendiri
11	41	P	SMP	Dagang Sandal	Pokok	Inisiatif Sendiri
12	43	L	SMA	Warung Makan	Pokok	Inisiatif Sendiri
13	63	P	SD	Pengepul	Pokok	Inisiatif Sendiri
14	40	P	SMA	Katering	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
15	47	P	SMA	Dagang Tahu	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
16	54	P	SMP	Warung Makan	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
17	51	P	SMP	Katering	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
18	57	P	SD	Pengepul	Pokok	Tidak Ada Pilihan Lain
19	58	P	SD	Warung Kelontong	Pokok	Inisiatif Sendiri
20	51	P	SMP	Dagang Makanan	Pokok	Penghasilan Tambahan
21	49	P	SMP	Ternak Ayam	Pokok	Penghasilan Tambahan
22	58	P	SD	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
23	50	P	SMP	Pembuat Peyek	Sambilan	Penghasilan Tambahan
24	51	P	SMP	Ternak Ayam	Sambilan	Penghasilan Tambahan
25	51	P	SMP	Ternak Ayam	Sambilan	Inisiatif Sendiri
26	52	P	SMP	Warung Kelontong	Sambilan	Inisiatif Sendiri
27	50	P	SD	Dagang Sayur	Sambilan	Penghasilan Tambahan
28	49	P	SMP	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
29	55	P	SMA	Ternak Ayam	Sambilan	Penghasilan Tambahan
30	57	P	SMP	Ternak Ayam	Sambilan	Inisiatif Sendiri
31	48	P	SMP	Warung Makan	Sambilan	Inisiatif Sendiri
32	49	P	SMP	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
33	55	P	SMP	Pengepul	Pokok	Inisiatif Sendiri
34	64	P	SD	Ternak Ayam	Sambilan	Inisiatif Sendiri
35	56	P	SD	Pengepul	Sambilan	Penghasilan Tambahan
36	52	P	SMP	Pembuat Kerupuk	Sambilan	Inisiatif Sendiri
37	43	P	SMA	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan

38	54	P	SMP	Pembuat Makanan Ringan	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
39	60	P	SD	Ternak Ayam	Sambilan	Penghasilan Tambahan
40	57	P	SMP	Ternak Ayam	Sambilan	Inisiatif Sendiri
41	49	P	SMP	Warung Kelontong	Sambilan	Inisiatif Sendiri
42	41	P	SMA	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
43	39	P	SMA	Pembuat Kerupuk	Sambilan	Penghasilan Tambahan
44	39	L	SMA	Kerajinan Bambu	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
45	39	L	SMA	Ternak Ayam	Sambilan	Inisiatif Sendiri
46	50	L	SMP	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
47	49	L	SMA	Warung Makan	Sambilan	Melanjutkan Usaha Keluarga
48	48	P	SMA	Katering	Pokok	Inisiatif Sendiri
49	39	P	SMP	Pembuat Makanan Ringan	Sambilan	Melanjutkan Usaha Keluarga
50	53	L	SD	Ternak Ayam	Pokok	Inisiatif Sendiri
51	54	L	SMP	Ternak Ayam	Sambilan	Penghasilan Tambahan
52	58	L	SMP	Bengkel	Pokok	Tidak Ada Pilihan Lain
53	37	P	SMA	Dagang Pakaian	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
54	54	P	SD	Dagang Sayur	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
55	57	P	SD	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan
56	53	P	SMA	Dagang Alat Rumah Tangga	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
57	58	L	SMP	Barang Bekas	Pokok	Melanjutkan Usaha Keluarga
58	59	L	SMA	Dagang Jam	Sambilan	Penghasilan Tambahan
59	49	L	SMA	Dagang Ayam	Sambilan	Penghasilan Tambahan
60	67	L	SMA	Warung Kelontong	Sambilan	Penghasilan Tambahan

Lampiran 6. Data Penelitian Responden USP KUD Subur

No.	Pengawasan Pembiayaan							Pembinaan terhadap UMKM									Dampak Peran Pengembangan UMKM					
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6
1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	3	3	3
2	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	3	3	4
3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2
4	4	4	3	4	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	1	4	3	3	3	3	2	3
5	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
7	4	4	4	4	2	4	3	3	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
8	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2
9	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3
10	4	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
11	4	4	4	4	2	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2
12	4	4	2	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	2	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3
14	4	4	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	4	3	3	3	2	3	2
15	4	4	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3
16	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3
17	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3	2
18	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3
19	4	3	3	3	2	2	3	4	4	4	2	3	3	3	1	4	3	3	3	4	3	3
20	4	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	4	3	3	3	2	3	3
21	4	4	4	4	4	2	3	4	3	3	2	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	2	2	3	4	4	2	3	2	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3
23	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
24	4	4	4	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2
25	4	3	2	3	2	3	4	3	2	2	2	2	3	3	2	4	4	3	3	2	3	3
26	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2
27	4	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	2	3	4	1	4	3	3	3	3	3	2
28	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3	2
29	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3
30	4	4	4	4	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3
31	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2
32	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
33	2	2	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	4
34	2	2	1	2	2	1	3	2	2	2	1	1	2	2	4	2	3	3	3	3	3	4
35	2	2	1	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	4

36	1	2	1	1	2	2	4	2	2	1	2	2	2	1	3	1	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	2	1	2	3	3	2	2	1	1	3	3	1	4	4	3	3	3	4	3
38	4	4	4	4	1	2	3	3	2	2	2	1	1	3	1	3	3	4	4	3	2	4
39	2	2	2	1	2	1	4	2	1	2	1	1	2	1	3	2	3	2	3	3	4	3
40	2	2	2	1	2	2	4	3	3	3	1	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4
41	2	1	1	2	2	2	4	2	2	2	2	1	1	2	4	2	3	3	2	3	4	3
42	2	2	2	1	2	1	4	2	1	1	2	2	1	2	4	1	4	3	3	2	4	3
43	2	2	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	1	1	3	1	2	2	3	3	2	4
44	2	2	1	1	1	1	4	2	1	1	2	1	2	2	4	2	3	2	2	2	2	3
45	2	2	2	2	1	2	4	2	2	1	1	1	2	2	4	2	2	2	2	3	4	3
46	2	2	1	1	1	1	4	2	1	2	2	2	1	1	3	1	2	2	2	3	3	3
47	2	2	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1	2	2	4	1	2	2	2	3	3	3
48	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	2	2	1	4	2	1	2	2	2	3	2	3
49	2	2	1	2	1	2	3	2	2	2	1	1	2	1	3	2	3	2	3	3	2	3
50	2	2	2	2	1	2	4	2	2	2	1	1	2	1	3	2	4	3	3	3	2	3
51	2	2	1	1	1	2	3	2	2	1	2	1	1	2	3	1	2	3	2	3	2	4
52	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	3	1	3	3	2	3	2	4
53	2	2	2	2	1	2	3	2	2	1	1	2	2	2	4	1	2	2	2	3	3	4
54	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	4	2	2	2	2	3	3	3
55	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	3	2	4
56	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	3	3	3
57	3	4	2	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	4	3	2	4
58	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	1	2	3	2	3	4	2	3
59	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	1	3
60	3	3	2	2	1	3	3	3	3	4	3	4	4	4	1	4	3	2	4	3	2	3

Lampiran 7. Data Penelitian Responden BMT Nur Rahmah

No	Pengawasan Pembiayaan							Pembinaan terhadap UMKM									Dampak Peran Pengembangan UMKM					
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6
1	3	4	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
2	4	4	4	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3
4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2
5	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	1	4	3	4	4	3	3	3
6	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2
7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2
8	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
9	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2
10	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	4	4	3	3	3
11	4	4	4	4	2	1	3	2	3	3	3	3	2	3	2	4	3	4	4	3	3	3
12	4	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4
13	4	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	2	1	2	4	2	3	3	3	2	3	3
14	3	3	3	2	1	2	3	2	2	1	1	1	2	2	3	1	3	3	3	3	2	3
15	3	3	2	1	1	2	3	3	2	2	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	2	2
16	4	3	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	3	3	3	3	2	3
17	4	4	4	2	3	2	3	2	2	1	2	1	1	2	3	2	3	2	3	3	2	3
18	3	3	2	3	1	2	3	2	2	1	1	2	1	2	3	1	3	2	3	2	2	3
19	3	3	2	1	1	2	3	2	2	2	2	1	1	1	3	1	3	3	3	3	2	3
20	3	3	2	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	4	1	3	2	3	3	3	3
21	3	3	2	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	4	1	3	2	3	2	2	3
22	3	4	2	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	3	2	2	3	3	3	2	3	4
23	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	2	3
24	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3
25	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	4
26	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4
27	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	4	4	4	3	3	3	3
28	4	4	4	3	2	3	4	4	2	1	2	1	2	1	1	3	4	3	3	3	3	4
29	4	3	2	1	1	2	3	4	2	1	2	2	1	3	2	4	4	2	3	2	4	3
30	4	3	2	1	1	2	3	3	4	2	3	3	3	3	1	4	4	1	3	3	3	3
31	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3
32	4	4	4	4	3	2	3	3	3	4	2	2	3	3	1	3	4	3	3	3	4	3
33	4	3	2	1	1	2	3	3	3	3	4	2	3	3	1	3	4	3	3	4	3	3
34	4	4	2	4	1	4	3	3	4	1	2	2	2	1	1	3	4	4	4	2	4	4
35	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	3	4	3	3	3	2	3
36	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	3	3	3	4	3	2	3

37	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	1	3	3	1	3	3	3	3	2	2	3
38	4	4	4	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3
39	3	3	3	1	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3
40	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	1	3	3	2	4	3	3	3
41	3	3	3	2	1	3	3	3	3	2	2	1	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3
42	3	3	3	2	1	3	3	3	3	2	2	1	2	3	2	3	3	3	4	3	2	3
43	3	3	3	4	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	2	3	3	3	4	2	2	3
44	4	4	4	4	2	2	3	4	3	3	1	2	2	3	1	3	4	3	4	2	3	4
45	3	3	3	2	2	2	3	2	2	1	1	2	2	2	3	1	3	3	3	3	2	3
46	3	3	2	2	3	3	4	2	2	2	1	1	1	3	1	2	3	3	3	3	2	4
47	3	4	3	2	2	2	1	4	2	1	2	1	3	3	1	2	4	2	3	2	2	3
48	4	3	2	1	2	1	3	3	3	3	2	1	3	3	1	3	4	2	3	4	1	3
49	3	4	2	2	1	2	3	3	2	1	1	2	3	3	1	2	3	2	4	3	2	3
50	4	3	2	2	1	2	3	4	2	2	1	1	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3
51	3	3	4	2	1	2	3	2	2	1	1	2	1	3	2	1	3	2	3	1	2	3
52	3	4	2	1	1	2	3	3	2	1	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	4
53	3	4	3	2	1	2	3	3	2	2	1	1	2	3	1	4	3	4	3	3	1	3
54	3	3	2	1	1	2	3	3	2	2	1	2	1	3	2	2	4	4	3	3	2	4
55	3	3	2	1	1	2	3	3	2	2	2	1	1	3	1	3	3	4	4	3	1	4
56	4	4	4	3	2	2	4	3	3	2	3	3	3	3	1	4	3	4	3	3	3	4
57	3	3	2	1	1	1	1	3	3	3	2	1	2	3	1	3	4	3	4	3	3	3
58	4	3	2	1	1	2	3	3	4	3	2	1	3	3	1	3	4	2	3	3	3	3
59	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	2
60	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	2	3	3

Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengawasan pembiayaan (USP)	Pengawasan pembiayaan (BMT)	Pembinaan UMKM (USP)	Pembinaan UMKM (BMT)	Dampak peran pengembangan UMKM (BMT)	Dampak peran pengembangan UMKM (BMT)
N		60	60	60	60	60	60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	17.8167	19.1833	20.1833	21.3000	17.2167	17.6667
	Std. Deviation	4.06094	3.17560	4.16398	3.89393	1.54142	1.67400
Most Extreme Differences	Absolute	.156	.137	.134	.129	.144	.171
	Positive	.156	.137	.134	.123	.139	.171
	Negative	-.098	-.112	-.107	-.129	-.144	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		1.209	1.065	1.040	.999	1.118	1.328
Asymp. Sig. (2-tailed)		.108	.207	.230	.271	.164	.059

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 9. Hasil Uji Homogenitas dan Uji *Independent t-test* Pengawasan Pembiayaan USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah

**Group Statistics**

Koperasi		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pengawasan pembiayaan	USP KUD Subur	60	17.8167	4.06094	.52427
	BMT Nur Rahmah	60	19.1833	3.17560	.40997

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pengawasan pembiayaan	Equal variances assumed	3.901	.051	-2.054	118	.042	-1.36667	.66553	-2.68459	-.04874
	Equal variances not assumed			-2.054	111.519	.042	-1.36667	.66553	-2.68539	-.04794

Lampiran 10. Hasil Uji Homogenitas dan Uji *Independent t-test* Pembinaan UMKM Penerima Pembiayaan dari USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah

**Group Statistics**

Koperasi		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pembinaan UMKM	USP KUD Subur	60	20.1833	4.16398	.53757
	BMT Nur Rahmah	60	21.3000	3.89393	.50270

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pembinaan UMKM	Equal variances assumed	.082	.776	-1.517	118	.132	-1.11667	.73600	-2.57414	.34081
	Equal variances not assumed			-1.517	117.473	.132	-1.11667	.73600	-2.57421	.34087

Lampiran 11. Hasil Uji Homogenitas dan Uji *Independent t-test* Dampak Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah terhadap Pengembangan Usaha

**Group Statistics**

Koperasi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Dampak peran pengembangan USP KUD Subur	60	17.2167	1.54142	.19900
UMKM BMT Nur Rahmah	60	17.6667	1.67400	.21611

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Dampak peran pengembangan UMKM	Equal variances assumed	.742	.391	-1.532	118	.128	-.45000	.29378	-1.03176	.13176
	Equal variances not assumed			-1.532	117.206	.128	-.45000	.29378	-1.03180	.13180

*Lampiran 12. Surat Keterangan Penelitian dari USP KUD Subur*



**KOPERASI UNIT DESA "SUBUR"**  
**KECAMATAN SEMIN**

BADAN HUKUM : 108/BH/76 MANDIRI TAHUN 1992  
Alamat : Keringan Kidul, Bulurejo, Semin, Gunungkidul

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. 13/KUD/SMN/V/2016

Yang bertandatangan di bawah ini, Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Subur Kecamatan Semin, menerangkan bahwa:

Nama : Retno Parwati  
NIM : 12804241003  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Pendidikan Ekonomi  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melakukan pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul "*Studi Komparasi Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Semin*" sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semin

Pada tanggal : 26 Mei 2016

Ketua KUD

Damin, BA

Lampiran 13. Surat Keterangan Penelitian dari BMT Nur Rahmah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 20 /BMT-NR/V / 2016.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suprpti Trigiyarsi, S.E.

Jabatan : Manajer

Alamat : Desa Semin, Kelurahan Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

HP : 081578697768

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum di bawah ini:

Nama : Retno Parwati

NIM : 12804241003

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Judul Skripsi : **Studi Komparasi Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Semin**

Telah melakukan pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul “ *Studi Komparasi Peran USP KUD Subur dan BMT Nur Rahmah dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Semin*” sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dikeluarkan di : Semin

Pada tanggal : 26 Mei 2016

Manajer BMT Nur Rahmah

Suprpti Trigiyarsi, S.E.

